



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Perubahan
**RENCANA KERJA (P-RENJA)
TAHUN 2021**



Disbunkaltim



Dinas Perkebunan Prov. Kaltim



<https://disbun.kaltimprov.go.id>

KATA PENGANTAR

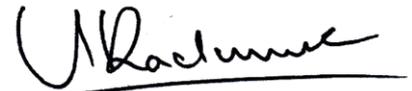
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2021 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran program kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan, sehingga memberikan acuan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi, Perencanaan Pembangunan Nasional yang diawali dengan Rapat Perencanaan Program Prioritas Tahun 2021 dan Forum Perangkat Daerah Tingkat Provinsi melibatkan Bappeda/PD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksana kegiatan serta pihak terkait lainnya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur.

Samarinda, 2021

Kepala Dinas,



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690120 199403 1 014

Daftar Isi

Halaman

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN.....	I-1
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Landasan Hukum	I-3
I.3. Maksud dan Tujuan	I-4
I.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	II-1
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu PD	II-1
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	II-18
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	II-21
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Kaltim	II-35
II.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-38
II.6. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	II-38
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	III-6
III.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-9
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
IV.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021	IV-1
IV.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan	IV-2
V. PENUTUP.....	V-1
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

<i>Nomor</i>	<i>Halaman</i>
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2019	II-3
2. Produksi Komoditas Perkebunan tahun 2020.....	II-4
3. Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2020.....	II-5
4. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Rehabilitasi Lada 160 Ha.....	II-6
5. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Sawit 100 Ha	II-7
6. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Lada 125 Ha.....	II-7
7. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kakao 80 Ha.....	II-8
8. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Karet 135 Ha.....	II-8
9. Rekapitulasi Luas lahan NKT per Kabupaten.....	II-10
10. Rekapitulasi Sertifikasi Benih Tahun 2020.....	II-13
11. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	II-18
12. Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2012-2020)	II-19
13. Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2020	II-23
14. Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2013-2020	II-25
15. Program Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah yang Disesuaikan	IV-3
16. Tabel T.C.29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2021.....	
17. Tabel T.C.31 Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2021.....	

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa Negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari serta meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Sub sektor perkebunan juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dimana upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan wilayah Kalimantan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 5% cukup sulit untuk dicapai apabila tidak ada upaya nyata untuk mengembangkan sektor riil, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui pengembangan pada sektor perkebunan.

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan surat keputusan Gubernur nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, dimana dalam penyusunannya mengacu pada RENSTRA.

Dalam pelaksanaannya pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan serta berbagai persoalan mendasar seperti pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan milik petani, terbatasnya kemampuan sistem perbenihan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh serta kurangnya koordinasi kerja antar sub sektor yang terkait pembangunan perkebunan.

Salah satu prioritas program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 pada sub sektor perkebunan adalah :

1. Program Peningkatan produksi perkebunan;
2. Program Mitigasi emisi gas rumah kaca sektor perkebunan;
3. Program Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan;
4. Program Peningkatan mutu dan pemasaran hasil perkebunan;
5. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
7. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
8. Program perizinan Usaha Pertanian; dan
9. Program Penyuluhan Pertanian.

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan 2019 – 2023. Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Perubahan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disusun secara selaras dengan tema RKPD tahun 2021 yaitu **“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** dan mengakomodasikan Renja

Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya seperti Perguruan Tinggi, Forum Masyarakat Pertanian, Kelompok Tani dan lain-lain.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021; dan
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2021 .

Tujuan yang diharapkan dari Renja ini adalah :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu program/ kegiatan/ sub kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
4. Tersusunnya dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Perubahan Renja, landasan hukum penyusunan Perubahan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja dan sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat ringkasan singkat dari Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2020 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksana kegiatan adalah Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu:

- 1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD PBP);
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP); dan
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Produsen Benih Tanaman Perkebunan (UPTD PBTP).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2020 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik untuk program rutin maupun teknis pembangunan adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp. 4.172.838.743,- dari pagu 4.577.109.718,- dengan capaian keuangan 91,16% dan untuk capaian indikator kinerja (K) sebesar 106%. Program ini memiliki output tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD dengan capaian 88% dari target 83%. Adapun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu *Pelaksanaan Administrasi Perkantoran* dengan 16 (enam belas) sub kegiatan yakni :
 - a) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - b) Honorarium pengelolaan keuangan ;
 - c) Belanja Alat Tulis Kantor;

- d) Belanja Alat Listrik dan Elektronik;
- e) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya;
- f) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas;
- g) Belanja Telepon;
- h) Belanja Air;
- i) Belanja Listrik;
- j) Belanja Surat Kabar/Majalah;
- k) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit;
- l) Belanja Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis;
- m) Belanja Jasa KIR;
- n) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- o) Belanja Cetak; dan
- p) Belanja Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan.

Dimana output dari kegiatan tersebut atas adalah jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran dari target 12 bulan tercapai 12 bulan (100%).

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp. 3.760.976.823,- dari pagu Rp. 3.809.052.900,- dengan capaian keuangan sebesar 98,72% dan capaian kinerja (K) sebesar 100% (tercapai 5 unit dari target 5 unit). Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 2 kegiatan, yakni:
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan pagu Rp 1.683.219.000,- dan realisasi Rp 1.664.934.423,- (98,91%). Kegiatan ini memiliki output jumlah peralatan dan kelengkapan kantor dengan capaian 16 unit dari target 15 unit (107%).
 - b. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan pagu 2.082.240.900,- dengan realisasi Rp 2.052.449.400,- (98,56%). Kegiatan ini memiliki output jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana dengan capaian 12 bulan dari target 12 bulan (100%).
3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah** realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp. 1.861.299.016,- dari pagu Rp. 2.017.070.500,- dengan capaian keuangan sebesar 92,27% dan capaian indikator kinerja (K) sebesar

100%. Dari target kinerja yaitu persentase ASN yang memiliki standar kompetensi sebesar 20% tercapai 20%. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah terdiri dari 2 kegiatan, yakni:

- a. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan pagu Rp 1.447.883.000,- dan realisasi Rp 1.357.190.146 (93,74%). Kegiatan ini memiliki output sebagai berikut:
 - 1) Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja 4 kegiatan dari target 4 kegiatan.
 - 2) Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan capaian kinerja 4 kegiatan dari target 4 kegiatan.
 - 3) Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman dengan capaian kinerja 12 bulan dari target 12 bulan.
- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu Rp 14.000.000,- dengan realisasi Rp 12.500.000,- (89,29%). Kegiatan ini memiliki output jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek dengan capaian 4 orang dari target 50 orang. Tidak tercapainya target dikarenakan kegiatan ini mengalami rasionalisasi akibat pandemi covid-19.

4. **Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan** realisasi keuangan sebesar Rp. 1.066.364.262,- dari pagu dana Rp. 1.097.060.000,- dengan capaian keuangan sebesar 97,20% dan capaian indikator kinerja (K) sebesar 103%. Dari target kinerja nilai akuntansi kinerja PD sebesar 68% tercapai 69,93 % sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2019

No.	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30%	27,25
b.	Pengukuran Kinerja	25%	15,31
c.	Pelaporan Kinerja	15%	12,22
d.	Evaluasi Internal	10%	5,73
e.	Capaian Kinerja	20%	9,42
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	69,93

Program ini memiliki 2 kegiatan, yakni:

- a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dari pagu sebesar Rp 723.120.000,- terealisasi Rp 720.959.300 (99,70%). Kegiatan ini memiliki output jumlah dokumen perencanaan dan anggaran dengan capaian 10 dokumen dari target 10 dokumen (100%) yang terdiri dari: 1) Dokumen Renja 2021, 2) Perubahan Renja 2020, 3) DPA, 4) RKA, 5) DPPA, 6) RKAP, 7) RKT, 8) Evaluasi Renja, 9) Standarisasi Harga, dan 10) Pedoman Umum.
 - b. Kegiatan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari pagu sebesar Rp 373.940.000,- terealisasi Rp 345.404.962,- (92,37%). Kegiatan ini memiliki output jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan capaian 4 dokumen dari target 4 dokumen (100%) yang terdiri dari: 1) Laporan Tahunan, 2) LPPD, 3) LkjIP, dan 4) Statistik.
5. **Program Peningkatan Produksi Perkebunan** terealisasi sebesar Rp. 8.602.374.400,- dari pagu dana Rp. 10.387.335.000,- dengan capaian kinerja keuangan 82,82% dan capaian indikator kinerja (K) sebesar 99,98%. Capaian keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan silpa positif. Program ini memiliki output peningkatan produksi komoditas perkebunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.2. Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
Produksi komoditas perkebunan (Ton)	16.812.938	16.809.560	99,98	Angka sementara Tahun 2020 (Sumber Dinas Perkebunan)
a. Kelapa Sawit (Ton TBS)	16.717.254	16.717.254	100	
b. Karet (Ton)	74.060	70.682	95,44	
c. Kelapa (Ton)	12.468	12.468	100	
d. Kakao (Ton)	3.307	3.307	100	
e. Lada (Ton)	5.849	5.849	100	

Program ini terdiri dari 3 kegiatan, yakni:

- a. Kegiatan peningkatan produktivitas perkebunan dari pagu Rp 3.299.585.000,- terealisasi Rp. 2.757.128.900,- (83,56%). Kegiatan ini memiliki output peningkatan produktivitas komoditas perkebunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.3. Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)				Angka sementara Tahun 2020 (Sumber Dinas Perkebunan)
a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)	19,5	20,70	106	
b. Karet (Ton/Ha)	1,35	1,44	107	
c. Kelapa (Ton/Ha)	0,80	0,75	94	
d. Kakao (Ton/Ha)	0,70	0,74	106	
e. Lada (Ton/Ha)	1,15	0,92	80	

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan produktivitas 5 komoditi di atas pada tahun 2020 dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peremajaan Kakao seluas 50 Ha

Kegiatan peremajaan kakao tercapai 50 Ha dari target 50 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah kelompok tani Lalut Nanga di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur seluas 50 Ha dan jumlah KK 30.

- 2) Rehabilitasi Kebun Lada 160 Ha

Kegiatan rehabilitasi lada tercapai 160 Ha dari target 160 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Berau 70 seluas Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 75 Ha dan di Kota Samarinda seluas 15 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.4. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Rehabilitasi Lada 160 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
1.	Malonan Jaya	70	36	Kamp. Merancang Ilir Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
2.	Bunga Buana	10	10	Ds. Salo Cela Kec. Muara Badak Kab. Kukar
3.	Taruna	10	14	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
4.	Etam	5	10	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
5.	Peduli Lingkungan	3	6	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
6.	Mitra Sejati I	3	9	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
7.	Mitra Lada	2	9	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
8.	Mandiri	4	8	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
9.	Mitra Sejati II	7	11	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
10.	Pada Idi	5	12	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
11.	Mandiri Bersaudara	4	8	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
12.	Mega Buana	8	19	Ds. Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar
13.	Karya Tani	6	11	Ds. Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar
14.	Setia Bersama	8	13	Ds. Tani Bakti Kec. Samboja Kab. Kukar
15.	Tunas Baru	6	7	Kamp. Bayur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda
16.	Sepakat	5	6	Ds. Muang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda
17.	Maju Muang	2	1	Ds. Muang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda
18.	Karya Mandiri	2	1	Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda
TOTAL		160	133	

- b. Kegiatan perluasan komoditas perkebunan dari pagu Rp. 6.729.502.500,- terealisasi Rp. 5.500.215.500,- (81,73%). Kegiatan ini memiliki output peningkatan luas kebun (Ha) dengan realisasi 460 Ha dari target 460 Ha (100%). Output tersebut dicapai dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Perluasan Areal Kelapa Sawit 100 Ha

Kegiatan perluasan areal kelapa sawit tercapai 100 Ha dari target 100 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur seluas 50 Ha dan Kabupaten Kutai Barat seluas 50 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.5. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Sawit 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
1.	Mekar Jaya	50	35	Ds. Bukit Permata Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur
2.	Mekar Jaya	25	25	Kmp. Tanjung Sari Kec. Bongang Kab. Kutai Barat
3.	Cipta Karya	25	25	Kmp. Bukit Harapan Kec. Bongang Kab. Kutai Barat
TOTAL		100	85	

2) Perluasan Areal Kelapa 20 Ha

Kegiatan perluasan areal kelapa tercapai 20 Ha dari target 20 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah kelompok tani Sumber Ilahi di Desa Santan Tengah Kec. Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 20 Ha dengan jumlah KK 10.

3) Perluasan Areal Lada 125 Ha

Kegiatan perluasan areal lada tercapai 125 Ha dari target 125 Ha (100%). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Berau seluas 25 Ha, Kabupaten Kutai Barat seluas 75 Ha dan Kabupaten Kutai Timur seluas 25 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.6. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Lada 125 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
1.	Surya Tani	25	23	Kmp. Bukit Makmur Jaya Kec. Biatan Kab. Berau
2.	Harapan Baru	28	28	Kmp. Linggang Melapeh Baru Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat
3.	Harapan Kita	16	16	Kmp. Ongko Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
4.	Bina Karya	12	12	Kmp. Balok Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
5.	Lada Lestari	19	19	Kmp. Juaq Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
6.	Agribisnis	25	20	Ds. Long Poq Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur
TOTAL		125	118	

4) Perluasan Areal Kakao 80 Ha

Kegiatan perluasan areal kakao tercapai 80 Ha dari target 80 Ha (100%). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur seluas 80 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.7. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kakao 80 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
1.	Gapoktan Mitra Tani	30	18	Ds. Mata Air Kec. Kaibun Kab. Kutai Timur
2.	Sumber Rejeki	20	20	Ds. Mata Air Kec. Kaibun Kab. Kutai Timur
3.	Sumber Makmur	30	40	Ds. Mata Air Kec. Kaibun Kab. Kutai Timur
TOTAL		80	118	

5) Perluasan Areal Karet 135 Ha

Kegiatan perluasan karet tercapai 135 Ha dari target 135 Ha (100%). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat seluas 95 Ha dan Kota Samarinda seluas 40 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.8. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Karet 135 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
1.	Karya Tani 2	25	21	Kmp. Balok Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
2.	Karya Tani 3	25	21	Kmp. Balok Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
3.	Lestari	29	27	Kmp. Pepas Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
4.	Sinar Tani IV	16	16	Bentuas Kec. Palaran Kota Samarinda
5.	Tani Maju	13	11	Bentuas Kec. Palaran Kota Samarinda
6.	Subur Makmur	5	4	Bentuas Kec. Palaran Kota Samarinda
7.	Mekar Jaya	7	9	Bentuas Kec. Palaran Kota Samarinda
8.	Pada Elo	15	12	Bentuas Kec. Palaran Kota Samarinda
TOTAL		135	100	

- c. Kegiatan pengembangan kelembagaan perkebunan dengan pagu 358.247.500,- dengan realisasi Rp 345.030.000,- (96,31%). Target kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk sebanyak 20 unit dan capaian 20 unit di Kabupaten Kutai Barat (Komoditi Karet, Lada dan Kelapa Sawit), Samarinda (Komoditi Karet), Kabupaten Kutai Timur (Komoditi Kakao, Lada dan Kelapa Sawit) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Komoditi Kelapa).
6. **Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan** realisasi keuangan sebesar Rp. 464.349.800,- dari pagu dana Rp 491.400.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,50% dan untuk capaian indikator kinerja (K) 140%. Output program ini adalah menurunnya emisi sektor perkebunan dengan capaian sebesar 2,916 juta ton CO₂eq dari target 4,080 Juta ton CO₂eq. program ini terdiri dari 3 kegiatan, yakni:
- Kegiatan Pengembangan EBT pada sektor perkebunan dengan pagu Rp 165.600.000,- terealisasi sebesar Rp 153.952.300,- (92,97). Target kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS) mengalami rasionalisasi akibat pandemi covid-19 dari 2 PMS menjadi 1 PMS dengan capaian 1 PMS (100%) yaitu PT. Dharma Satya Nusantara Tbk di Kabupaten Kutai Timur.
 - Kegiatan Perlindungan Lahan Konservasi di Areal Perkebunan dengan pagu sebesar Rp 123.100.000 dan realisasi sebesar Rp 123.011.600,- (99,93%). Target kinerja pada kegiatan ini yaitu luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (ha) seluas 101.500 ha dan capaian pada kegiatan ini yaitu 106.000 ha (104%). Rekapitulasi luas lahan NKT per Kabupaten sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.9. Rekapitulasi Luas Lahan NKT per Kabupaten

Kabupaten	Jumlah PBS	Luas NKT (Ha)
Berau	9	8.700
Kutai Barat	12	5.600
Mahakam Ulu	2	1.900
Penajam Paser Utara	4	2.500
Paser	10	4.000
Kutai Kartanegara	29	39.000
Kutai Timur	55	44.300
Jumlah	121	106.000

- c. Kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan dengan pagu sebesar Rp 202.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp 187.385.900,- (92,44%). Target kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina sebanyak 5 KTPA, dan capaian kinerjanya sebanyak 6 KTPA (120%) (3 di Kabupaten Paser dan 3 di Kabupaten Kutai Barat).
7. **Program Pembinaan dan Pengawasan usaha Perkebunan** realisasi keuangannya sebesar Rp. 472.311.200,- dari pagu dana Rp. 475.065.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,42%, untuk capaian indikator kinerja (K) 51%. Program ini memiliki output meningkatnya jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dari target 35 Perusahaan tercapai sebanyak 18 perusahaan, terdiri dari 12 perusahaan di Kabupaten Kutai Timur (PT Subur Abadi Wana Agung, PT Hambaran Perkasa Mandiri, PT Kresna Duta Agroindo, PT Tapian Nadenggan, PT DSN Group, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Dharma Inti Sawit Nugraha, PT Karyanusa Eka Daya I/II dan PT Subur Abadi Plantation), 2 Perusahaan di Kabupaten Berau (PT Mulia Inti Perkasa dan PT Dwiwira Lestari Jaya), dan 4 Perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (PT Enggang Alam Sawita, PT Hambaran Sentosa, PT Sawit Unggul Agro Niaga dan PT Mula Persada Raya). Tidak tercapainya target 35 Perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dikarenakan adanya pemotongan anggaran di Provinsi maupun di Kabupaten akibat pandemi covid-19 dan sesuai dengan SOP perusahaan untuk tidak memperkenankan pihak luar untuk masuk ke daerah perusahaan pada saat pandemi covid-19. Pada program ini terdapat kegiatan:

- a. Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan dari pagu Rp 158.390.000,- dan realisasi sebesar Rp 156.808.500,- (99,00%) dengan capaian target kinerja 25 koperasi (jumlah lembaga pekebun yang dimitrakan) dari target 25 koperasi (100%). Terdapat penambahan 5 koperasi yang dimitrakan, yaitu Koperasi Nusa Udip Tiga, KSU Putra Harapan, KSU Pet Sot Sang Wehe, Koperasi Lintas Benua Abadi, dan Koperasi One berkat Solidaritas.
 - b. Penanganan Konflik Usaha Perkebunan dari pagu Rp. 120.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.241.100,- (99,12). Capaian kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan sebanyak 6 konflik dari target 5 konflik (120%). 6 konflik tersebut antara lain:
 - 1) Konflik antara PT Maju Kalimantan Hadapan, PT Cahaya Anugerah Plantation dan Koperasi Sawit Sendowan;
 - 2) Konflik antara PT Enggang Alam Sawita dengan PT Beringin Alam Raya (Pertambangan);
 - 3) Konflik antara Pemkab Paser, PT Anugerah Abadi Multi Usaha dan Masyarakat Desa Luan Kec. Muara Samu;
 - 4) Konflik antara PT Gunta Samba Jaya dengan LPPMTI;
 - 5) Konflik antara PT Dwiwira Lestari Jaya dengan Koperasi Biatan Bersama dan Koperasi Sawit Sejahtera; dan
 - 6) Konflik antara PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation dengan Koperasi Cahaya Rungkap.
 - c. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan dari pagu Rp. 196.375.000,- terealisasi sebesar Rp. 196.261.600,- (99,94%). Capaian kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah pelaku usaha yang dibina sebanyak 21 perusahaan dari target 20 perusahaan (105%) terdiri dari: 8 Perusahaan di Kabupaten Kutai Timur, 7 Perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 3 Perusahaan di Kabupaten Paser, 1 Perusahaan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan 2 Perusahaan di Kabupaten Berau.
8. **Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan** terealisasi sebesar 830.746.200,- dari pagu sebesar 844.330.000,- dengan capaian kinerja keuangan 98,39% dan capaian indikator kinerja 50%. Target indikator pada program ini yaitu

jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI sebanyak 2 produk dan capaiannya sebanyak 1 produk, yaitu uji biji kakao dalam kemasan plastik untuk 4 kelompok tani di Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur. Tidak tercapainya target program akibat rasionalisasi akibat pandemi covid-19. Pada program ini terdapat kegiatan:

- a. Pembinaan Pasca Panen Perkebunan dari total pagu sebesar Rp331.792.500,- dengan realisasi Rp 328.556.600,- (99,03%). Target kinerja pada kegiatan ini adalah jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok Tani) sebanyak 3 KT dan capaian kinerjanya sampai dengan akhir tahun anggaran sebanyak 4 Kelompok Tani (133%). Kelompok tani tersebut antara lain:
 - 1) Bunga Mawar A;
 - 2) Karya Tani A;
 - 3) Karya Etam Lestari; dan
 - 4) Subur Raya II.
 - b. Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan dengan nilai pagu Rp. 381.765.000,- terealisasi sebesar Rp. 373.013.100,- (97,71%). Target kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah jenis olahan hasil perkebunan sebanyak 2 produk. Capaian kinerja pada kegiatan ini sebanyak 2 produk, yaitu komoditi kelapa di Kota Balikpapan dengan hasil olahan kelapa klapertart dan es krim kelapa , dan komoditi kakao di Kabupaten Kutai Timur dengan hasil olahan bolu kukus, sirup cokelat dan selai cokelat (100%).
 - c. Promosi Produksi Perkebunan dengan pagu sebesar Rp 130.772.500,- dengan realisasi sebesar 129.166.500,- (98,77%). Target kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah promosi yang diikuti 1 event. Realisasi target sebanyak 1 event tidak bisa tercapai dikarenakan tidak diperbolehkan mengadakan acara seperti expo/ pameran pada masa pandemi covid-19. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya fasilitasi pemasaran karet dan lada di Penajam paser Utara.
9. **Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih** terealisasi sebesar Rp. 339.673.600,- dari pagu sebesar Rp. 341.960.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,33% dan untuk capaian indikator kinerja 232%. Indikator kinerja program ini yaitu jumlah benih yang beredar 2.905.176 benih dan realisasinya sebanyak 6.749.812 benih yang terdiri dari benih kelapa sawit sebanyak 4.759.327 benih, karet sebanyak

265.000 benih, lada sebanyak 1.092.500 benih, Aren sebanyak 188.850 benih, Kakao sebanyak 386.500 benih, Kopi sebanyak 27.335 benih dan Kelapa Dalam sebanyak 30.300 benih. Pada program ini terdapat 2 kegiatan:

- a. Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Benih dari pagu Rp 234.450.000,- terealisasi sebesar Rp 233.962.650,- (99,79%). Output dari kegiatan ini adalah persentase peredaran benih yang illegitim. Pada tahun 2018 terdapat benih illegitim sebanyak 85.000 benih kelapa sawit dan 2019 sebanyak 95.000 benih kelapa sawit, sehingga terjadi penurunan kasus benih illegitim sebesar 3,07 persen dari target 3,08 persen atau sebesar 102%.
- b. Pengujian dan Sertifikasi Benih dari nilai pagu 107.510.000,- terealisasi Rp 105.710.950,- (98,83%). Output dari kegiatan ini adalah jumlah benih yang disertifikasi sebanyak 2.000.000 benih dan untuk capaian pada kegiatan ini sebanyak 3.034.162 benih yang disertifikasi atau sebesar 152%. Berikut data sertifikasi yang telah dilakukan selama tahun 2020:

Tabel II.10. Rekapitulasi Sertifikasi Benih Tahun 2020

No	Komoditas	Jumlah			Ket
		Surat Permohonan	Sertifikat yang diterbitkan	Benih	
1	Kelapa Sawit				
	- Kecambah	54	54	528.609	SKHP2KKS SMB
	- Benih	27	27	660.602	
2	Aren				
	- Kecambah	5	5	55.100	SMB
	- Benih	9	9	126.200	SMB
3	Lada				
	- Stek	11	11	402.200	SMB
	- Benih	16	16	673.240	SMB
4	Karet				
	- Benih	4	4	255.400	SMB
5	Kelapa Dalam				
	- Benih	4	4	28.961	SMB
6	Kakao				
	- Benih	8	8	303.850	SMB
	Jumlah	138	138	3.034.162	

Pelaksanaan sertifikasi pada tahun 2020 dilakukan pada 5 (lima) Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Samarinda sebanyak 975.711 benih terdiri dari 296.400 benih kakao, 64.100 benih lada dan 615.211 benih kelapa sawit, Kutai Kartanegara sebanyak 1.045.405 benih terdiri dari 707.600 benih lada, 5.300 benih kelapa dalam, 265.000 benih Karet, 10.500 benih kakao dan 57.005 benih kelapa sawit, Kutai Timur sebanyak 326.650 benih terdiri dari 191.550 benih aren, 25.000 benih kelapa dalam dan 110.100 benih kelapa sawit, Kutai Barat sebanyak 37.500 benih kakao, Paser sebanyak 433.216 benih kelapa sawit dan 1 Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 376.700 benih terdiri dari 346.000 benih lada dan 30.700 benih kelapa sawit.

10. **Program Penyediaan Bahan Tanaman** terealisasi Rp. 1.388.963.500,- dari pagu Rp 1.435.142.168,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,78%. Indikator kinerja program yaitu persentase pemenuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat sebesar 85% atau sebesar 100%. Pada program ini terdapat 2 kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar dari pagu Rp 800.805.868,- terealisasi Rp 794.541.700,- (99,22%). Output dari kegiatan ini yaitu jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar yang terdiri dari kelapa sawit 15.000 benih, karet 25.000 benih dan aren 10.000 benih. Dengan capaian output sebesar 100% terdiri dari kelapa sawit 15.000 benih, karet 25.000 benih dan aren 10.000 benih.
 - b. Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah dengan pagu Rp 634.336.300,- dengan realisasi Rp 594.421.800,- (93,71%). Output pada kegiatan ini adalah jumlah benih tanaman semusim dan rempah yang terdiri dari komoditi lada 25.000 benih, pala 40.000 benih dan sereh wangi 10.000 benih. Dengan capaian output 69% yakni untuk tanaman lada sebanyak 13.723 benih (untuk penyediaan awal tanaman lada sebanyak 25.000, seiring berjalannya waktu dan dikarenakan faktor cuaca maka ada sebanyak 11.277 benih yang mati), untuk tanaman sereh wangi penyediaan awal sebanyak 10.000 benih, sama halnya dengan tanaman lada ada benih yang mati sebanyak 2.500 benih, jadi tanaman sereh wangi yang hidup sebanyak 7.500 dan untuk tanaman pala sebanyak 10.000 benih telah terpenuhi.
11. **Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan** dari nilai pagu sebesar Rp. 734.305.000,- terealisasi sebesar Rp. 668.396.892,- dengan capaian kinerja

keuangan sebesar 91,02%. Indikator kinerja pada program ini yaitu Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT Rp 1.087.534.440,-. Capaian kinerja pada program ini Rp 996.352.513,- atau sebesar 109%. Pada program ini terdapat 2 kegiatan yaitu:

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari nilai pagu sebesar Rp. 454.245.000,- terealisasi sebesar Rp. 399.140.837,- (87,87%). Output pada kegiatan ini yaitu luas lahan yang dikendalikan dengan target 220 ha, dan capaian kinerja pada akhir tahun 2020 seluas 209,80 ha lahan yang dikendalikan atau sebesar 105%.
- b. Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pestisida (BP) dari pagu Rp 280.060.000,- terealisasi Rp 269.256.055,- atau sebesar 96,14%. Output pada kegiatan ini adalah jumlah produk Agens Pengendali Hayati (APH) sebanyak 5.000 kg APH padat dan 500 Liter APH cair. Untuk APH cair telah dibuat sebanyak 500 Liter (100%). APH padat tidak dianggarkan untuk dibuat pada tahun 2020 dikarenakan stok APH padat pada tahun sebelumnya masih ada sebanyak 13.882 kg.

Tahun 2020 Dinas Perkebunan melaksanakan 11 (Sebelas) program pembangunan dan rutin dengan total anggaran sebesar **Rp. 26.209.830.285,50,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 23.628.294.436,-** atau **90,15%** realisasi keuangan dan realisasi fisik **100%**.

Pada tahun 2021 Dinas Perkebunan melaksanakan 5 (Lima) Program pembangunan dan 1 (Satu) Program rutin dengan total anggaran sebesar **Rp. 54.524.471.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III mencapai **Rp.26.358.127.199,-** atau **62,65%**. Dengan estimasi realisasi sampai dengan Desember 2021 mencapai **Rp. 47.455.584.703,-** atau **87,03%**. Hal ini dikarenakan terdapat silpa positif yang berasal dari sisa pengadaan dan gaji pegawai.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2021 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik untuk program rutin maupun teknis pembangunan adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dari nilai pagu sebesar Rp. 25.609.668.880,- sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp. 15.708.171.190,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 61,33%. Indikator kinerja pada program ini yaitu Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan dengan target 86%. Capaian kinerja pada program ini 84,83%,- atau 98,64%. Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** dari nilai pagu sebesar Rp. 10.009.000.800,- sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp. 6.411.961.196,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 64,06%. Indikator kinerja pada program ini yaitu:
 - a. Produksi komoditas perkebunan dengan target 17.136.849,15 Ton. Capaian kinerja pada indikator ini yakni 17.792.792 Ton atau 106,78%.
 - b. Jumlah benih beredar dengan target 6.000.000 benih. Capaian kinerja pada indikator ini yakni 5.627.144 benih atau 93,79%.
 - c. Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat dengan target 75%. Capaian kinerja pada indikator ini 0%. Hal ini dikarenakan capaian program dapat dihitung pada triwulan IV.Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - b) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
3. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** dari nilai pagu sebesar Rp. 7.961.308.880,- sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp. 6.376.885.223,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 80,10%. Indikator kinerja pada program ini yaitu:

- a. Luas kebun yang dibangun dengan target 1.425.580 Ha. Capaian kinerja pada indikator ini yakni 1.540.488 Ha atau 108,06%.
- b. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan dengan target 30 kelompok tani. Capaian kinerja pada indikator ini yakni 34 kelompok tani atau 113,33%.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a) Penataan Prasarana Pertanian
4. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** dari nilai pagu sebesar Rp. 2.438.000.000,- sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp. 1.334.288.026,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 54,73%. Indikator kinerja pada program ini yaitu:
 - a. Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan dengan target 4,079 Juta Ton CO₂Eq. Capaian kinerja pada indikator ini yakni 6,02 Juta Ton CO₂Eq atau 109,46%.
 - b. Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT dengan target Rp. 1.047.138.860,-. Capaian kinerja pada indikator ini yakni Rp. 942.424.900 atau 50,42%.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a) Penataan Prasarana Pertanian
5. **Program Perizinan Usaha Pertanian Pertanian** dari nilai pagu sebesar Rp. 784.000.000,- sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp. 498.065.600,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 63,53%. Indikator kinerja pada program ini adalah Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) dengan target 35 Perusahaan. Capaian kinerja pada indikator ini yakni 10 Perusahaan atau 28,57%.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. **Program Penyuluhan Pertanian** dari nilai pagu sebesar Rp. 3.850.000.000,- sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp. 2.005.699.421,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 52,10%. Indikator kinerja pada program ini adalah jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk dengan target 1 lembaga. Capaian

kinerja pada indikator ini yakni 0 lembaga atau 0%. Hal ini dikarenakan capaian program dapat dihitung pada triwulan IV.

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
- b) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
- c) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tabel II.11. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
			(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	5,1	5,4	5,0	5,2	4,33	4,94*	5,0	5,2
	Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)		17.544	18.773	19.087	20.493	17.370	17.288*	20.493	21.997
2.	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ISPO (Perusahaan)	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	43	58	53	58	62	72	53	58
3.	NTP pekebun (%)	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	89	92	108	110	84,81	124,59	108	110

*) Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur (Angka Sangat Sementara Tahun 2020)

Uraian Pencapaian Kinerja

1. Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB

Tabel II.12 Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2012-2020)

Sektor/Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *	2020 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,65	7,00	7,72	8,22	7,98	7,89	7,91	8,77
1	Pertanian, Peternakan dan Jasa Pertanian	3,36	4,55	5,35	5,35	5,36	5,25	5,26	5,97
a	Tanaman Pangan	0,22	0,19	0,22	0,20	0,20	0,21	0,21	0,24
b	Tanaman Hortikultura	0,26	0,33	0,34	0,36	0,33	0,34	0,35	0,39
c	Tanaman Perkebunan	2,59	4,49	4,33	4,43	4,50	4,34	4,33	4,94
d	Peternakan	0,25	0,26	0,31	0,32	0,30	0,31	0,33	0,36
e	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,11	1,16	1,33	1,34	1,16	1,17	1,12	1,13
3	Perikanan	1,18	1,30	1,50	1,54	1,45	1,48	1,52	1,67

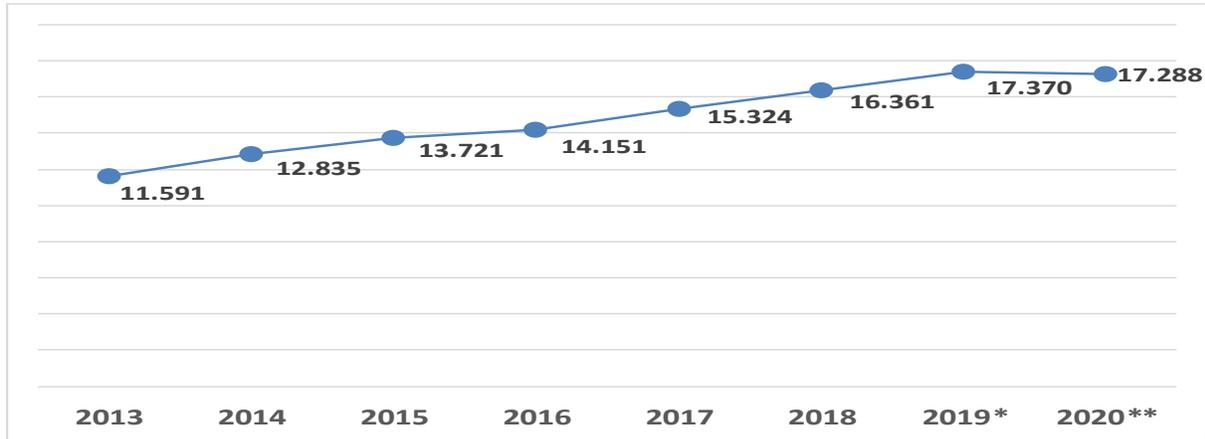
*Data sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

**Data sangat sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

Struktur perekonomian pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir didominasi oleh sub sektor perkebunan yang selalu mengalami peningkatan. Angka sementara tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 4,94% atau 56,33% dari PDRB sektor pertanian dalam arti luas.

2. Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan

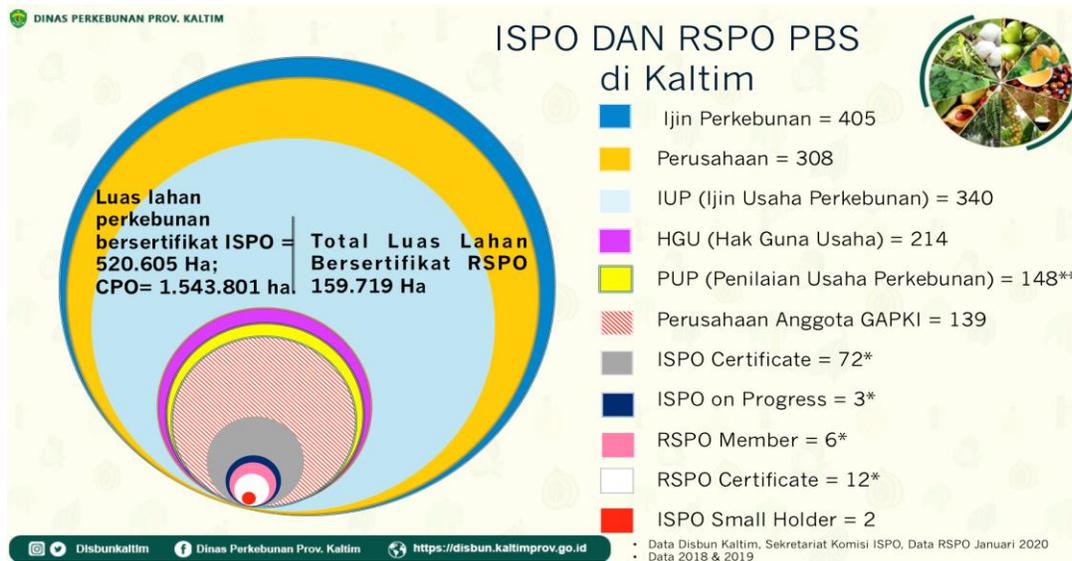
Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,67% yang diakibatkan penurunan produksi di masa pandemi Covid-19. Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan pada tahun 2013 sampai dengan 2020:



Gambar II.1

Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2020

3. Sertifikasi Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan



Gambar II.2

ISPO dan RSPO PBS di Kalimantan Timur Tahun 2020

Berdasarkan gambar II.2, pada tahun 2020 dari 308 Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 72 Perusahaan telah mendapat sertifikat ISPO dengan luas 520.605 HA atau sekitar 42,38% dari total luas perkebunan sawit di Kalimantan Timur.

4. NTP Pekebun

Jika dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP), selama tahun 2020 rata-rata NTP sektor perkebunan sebesar 124,59%. NTP subsektor perkebunan rakyat terlihat cenderung mengalami peningkatan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Perkembangan

nilai NTP Petani Tanaman Perkebunan Rakyat dari Januari sampai dengan Desember 2020 sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar II.3
NTP Sektor Perkebunan Januari-Desember 2020

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi berupa peluang dan ancaman juga kekuatan dan kelemahan yang ada terkait dengan dinamika lingkungan strategis, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan

Dilihat dari berbagai aspek seperti potensi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan pembangunan, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk perkebunan, Kalimantan Timur memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perkebunan.

Ruang wilayah Kalimantan Timur mengalami konflik ruang yang semakin meningkat, dimana terdapat 4,86 juta Ha tumpang tindih lahan perijinan antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kesemrawutan pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur telah menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi. Kehutanan, perkebunan dan pertambangan telah menguasai $\pm 88,47\%$ lahan di Kalimantan Timur, namun ketiga sektor tersebut membentuk struktur ekonomi daerah yang kurang kokoh, dan sangat rentan terhadap pengaruh perekonomian global.

Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang tindih perizinan lainnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Di sektor perkebunan, dari seluas $\pm 2,88$ Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di Kalimantan Timur, baru sekitar $\pm 1,54$ Juta Ha atau 53,47% yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih ada $\pm 46,53\%$ luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Hasil analisis data bahwa hingga Akhir 2020, jumlah ijin lokasi perkebunan yang telah diterbitkan oleh Bupati di Kalimantan Timur mencapai 405 ijin seluas 2.888.609 hektar dari alokasi ruang untuk perkebunan berdasarkan RTRW Kaltim seluas 3.269.561 hektar, dari jumlah dan luas ijin lokasi tersebut yang telah memperoleh IUP sebanyak 340 IUP dengan luas 2.524.537 hektar. Sementara total luas kebun sawit hingga 2020 adalah 1.378.136 hektar termasuk didalamnya kebun

Perusahaan Besar Negara (PBN), plasma dan swadaya. Data diatas menunjukkan bawa terdapat 1,14 juta Ha IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa sawit.

**Tabel II.13 Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2020
Oleh Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Perkebunan**

No.	Kabupaten/Kota	PEMANFAATAN LAHAN			
		Luas yang Telah Dibeberani Ijin Perkebunan (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	Realisasi Tanam Kebun Inti (ha)
1	2	3	4	5	6
1	Berau	281,725	204,725	127,918	100.891
2	Kutai Timur	814,128	745,307	384,100	357,059
3	Kutai Kertanegara	633,647	633,237	262,377	190.324
4	Kutai Barat	562,355	473,050	257,269	139.888
5	Mahakam Ulu	150,573	138,760	42,667	21.640
6	Penajam Paser Utara	82,552	82,639	29,258	27.992
7	Paser	363,629	246,819	154,214	101.116
8	Samarinda	-	-	-	-
9	Balikpapan	-	-	-	-
10	Bontang	-	-	-	20
	Jumlah	2,888,609	2,524,537	1,257,804	938.930

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)

Dari data diatas kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi ketidak efisienan dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak *clear* dan *clean* nya ijin yang diberikan kemudian menyebabkan permasalahan konflik lahan dan sesama perusahaan dan masyarakat yang menghambat laju penanaman. Atau juga terdapat praktek *landbanking* yang dilakukan perusahaan. Keadaan seperti ini meyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif karena tertutupnya

investasi baru dan kesulitan masyarakat dalam mengakses lahan karena lahan telah dibebani ijin.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan”** oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagian perijinan di sektor perkebunan belum clear dan clean;
- b. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban yang tertuang dalam IUP dan HGU belum optimal;
- c. Ijin Lokasi, IUP dan HGU yang tidak diusahakan belum ada upaya pencabutan;
- d. Pengawasan melalui sistem Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) kebun masa pembangunan dan operasional belum dilakukan sebagaimana mestinya;
- e. Masih banyak terjadi konflik usaha perkebunan;
- f. Koordinasi penerbitan ijin usaha perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Provinsi belum terlaksana dengan baik;
- g. Belum seluruh Kabupaten/Kota menerapkan sistem evaluasi, pengawasan dan pelaporan yang modern berbasis IT dan spasial; dan
- h. Belum dilakukannya pencabutan izin atau pencabutan hak atas tanah pada perusahaan perkebunan yang tidak merealisasikan penanamannya.

2. Rendahnya produktivitas kebun rakyat

Sebagaimana dijelaskan di dalam RPJMD, keterbatasan lapangan usaha masyarakat berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan sawit yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera.

Kalimantan Timur mempunyai areal perkebunan yang cukup luas. Sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh subsektor perkebunan

dengan komoditas utama tanaman kelapa sawit. Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Sektor Perkebunan mendominasi sektor Pertanian dalam arti luas sebesar 56,33% (4,94% dari total PDRB Kaltim). Nilai ini masih dapat terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan produksi. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat yang sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak, serta tidak diikuti dengan peremajaan dan pemeliharaan yang baik. Rincian produktivitas komoditi perkebunan rakyat tahun 2013-2020 pada tabel berikut:

Tabel II. 14 Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2013-2020

Komoditi	Produktivitas (Ton/Ha)								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Potensi berdasarkan PDKP
Kelapa Sawit	15.23	14.76	17.39	14.95	16.69	16.60	20.77	17.37	20.00
Karet	1.38	1.38	1.30	1.30	1.28	1.22	1.08	1.07	1.67
Kakao	0.90	0.71	0.77	0.55	0.50	0.55	0.57	0.61	1.00
Kelapa Dalam	0.65	0.56	0.68	0.63	0.80	0.75	0.67	0.47	1.50
Lada	1.05	1.03	1.06	0.72	0.99	1.05	0.91	0.59	1.20
Kopi	0.29	0.23	0.22	0.24	0.26	0.24	0.21	0.23	1.30

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, yaitu melalui intensifikasi, rehabilitasi maupun peremajaan.

Permasalahan “**Rendahnya produktivitas kebun rakyat**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan permodalan;
- b. Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai;
- c. Kesulitan dalam mendapatkan saprodi;

- d. Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS;
- e. Penggunaan benih yang ilegal;
- f. Praktek budidaya yang tidak tepat; dan
- g. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun.

3. Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal

Luas areal komoditi non sawit di Provinsi Kalimantan Timur seluas 161.316 Ha pada tahun 2019 dan 162.592 Ha pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, areal komoditi non sawit mengalami kenaikan hingga mencapai 0,79%. Masih rendahnya pertumbuhan komoditi non sawit disebabkan oleh rendahnya minat petani terhadap komoditi non sawit, terbatasnya lahan pengembangan, ketersediaan benih, dan sulitnya pemasaran.

Permasalahan “**Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Harga komoditas non sawit fluktuatif;
- b. Kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit;
- c. Alih fungsi lahan ke komoditi lainnya;
- d. Rantai pemasaran komoditas non sawit belum berpihak kepada petani;
- e. Berkurangnya tenaga kerja pekebun; dan
- f. Terbatasnya lahan karena didominasi oleh perijinan usaha kelapa sawit.

4. Permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya di barengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan harga yang menguntungkan bagi pekebun

maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-desa yang menjual hasil pertaniannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.

Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Industri hilir pertanian dalam arti luas belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini hasil perkebunan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO), kakao masih dalam bentuk glondongan dan karet masih dalam bentuk *crumb rubber*, walaupun untuk *Palm Kernel Oil* (PKO) masih belum optimal diproduksi.

Permasalahan Pemasaran dan Lambatnya pembangunan industri Hilir Komoditas Perkebunan” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern berbasis IT;
- b. Tidak kontinyu dan tidak padunya proses fasilitasi dan pendampingan kegiatan hulu hilir usaha perkebunan;
- c. Rendahnya kualitas olahan hasil perkebunan dan produk olahan yang dihasilkan tidak berorientasi pasar;
- d. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan sehingga dalam mengolah hasil perkebunan masih menggunakan alat dan mesin manual/ sederhana;
- e. Kurangnya sosialisasi dan pengenalan produk-produk olahan dan pemasaran komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/ Kota;
- f. Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, maupun antara hulu dan hilir yang sering menimbulkan konflik;
- g. Rantai pemasaran produk perkebunan yang panjang;
- h. Tidak adanya jaminan harga yang adil bagi petani; dan
- i. Kawasan agro industri dan infrastruktur pendukungnya belum dikembangkan dengan baik.

5. Meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh perluasan areal perkebunan dianggap salah satu faktor meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan menurunnya keanekaragaman hayati (biodiversiti). Namun, informasi yang memadai untuk menghitung tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peringkatnya dari seluruh sektor untuk seluruh provinsi belum dimiliki, tetapi

hanya tersedia tingkat emisi dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut tahun 2001-2012 di mana Kalimantan Timur menduduki peringkat keenam dibanding provinsi lain se-Indonesia (KLHK, 2015). Emisi GRK Kalimantan Timur pada periode tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun.

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023, penurunan terutama terjadi karena terjadi emisi negatif (sekuistrasi bersih) pada sektor perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut pada tahun 2014 serta kecenderungan menurunnya emisi dari sektor energi. Pengikatan karbon (sekuistrasi) bersih sebesar 23 juta ton CO₂ pada tahun 2014 pada sektor lahan terutama terjadi karena tingginya kebun yang dibangun di atas lahan semak belukar dan lahan terbuka. Sekuistrasi bersih tersebut berhasil menutup seluruh emisi GRK pada tahun 2014 dan membuat emisi akumulatif pada periode 2012-2015 dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut hanya sekitar 50 juta ton CO₂ atau sekitar 12,5 juta ton CO₂ per tahun.

Pemanasan global (*global warming*), isu deforestasi dan ancaman perkebunan terhadap kehidupan flora fauna dilindungi menjadi isu lingkungan utama pada sektor perkebunan, isu ini di hembuskan baik seara lokal, regional, nasional dan global.

Pembangunan perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan kebun berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Untuk itu, pembangunan perkebunan juga harus dikaitkan dengan upaya-upaya untuk meminimalisir kerusakan ekosistem. Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan yang dapat diusahakan saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai konservasi.

Oleh karenanya, dalam pengelolaan lingkungan pada sektor perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Permasalahan “**Meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Adanya kampanye negatif terhadap kelapa sawit;
- b. Belum semua pihak memahami makna perkebunan yang berkelanjutan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan kritis di pola ruang perkebunan yang diperuntukkan bagi pembangunan perkebunan;
- d. Masih ada aktivitas pembangunan kebun rakyat di kawasan hutan;
- e. *Supply Chain* produksi kelapa sawit masih belum tertata dengan baik;
- f. Pengawasan dan penerapan Sanksi oleh penerbit izin usaha belum dilakukan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. Komitmen perusahaan Perkebunan terhadap pengelolaan lingkungan masih beragam;
- h. Pemanfaatan limbah cair untuk pengembangan energi baru terbarukan belum optimal karena belum didukung oleh kebijakan ketenagalistrikan; dan
- i. Pengelolaan kawasan ANKT di kawasan perkebunan belum optimal.

6. Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah

Informasi dan data yang akurat merupakan suatu keharusan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Demikian pula dalam pembangunan Perkebunan membutuhkan sistem pengelolaan data yang akurat untuk digunakan pada proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi pembangunan perkebunan. Pengelolaan data ini tidak hanya cukup berisi data tabular variabel kuantitatif dan waktu, namun harus dilengkapi dengan aspek spasial yang dapat menunjukkan lokasi dan ruang dimana kebun tersebut akan dan telah dibangun.

Padahal, pelaporan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja Dinas Perkebunan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan. Apabila data-data yang disampaikan tidak akurat, maka masyarakat akan memperoleh informasi yang salah dan tentu saja akan membawa dampak buruk bagi Dinas Perkebunan.

Selain itu, aspek spasial diperlukan untuk melengkapi dan memverifikasi data dan informasi tabular. Selama ini pemanfaatan data spasial di Dinas Perkebunan

terbatas pada saat pemberian pertimbangan teknis ijin yang akan diberikan namun pada saat evaluasi, pengawasan dan pembinaan aspek spasial belum banyak di dayagunakan. Untuk mengatasi tersebut diperlukan pengumpulan dan verifikasi dan pengolahan data perkebunan yang baik serta dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola data detail seperti lokasi, luasan, produksi, rencana penanaman, sistem pengangkutan sampai pada data nilai ekonomi komoditas perkebunan.

Pada tahun 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan secara online, yaitu : Web Gis Perkebunan, Sistem Informasi Pelaporan Perkebunan (SIP-Kebun) dan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) Online. Melalui sistem informasi tersebut, diharapkan akan menjadi jawaban atas semua permasalahan mengenai data dan informasi yang disediakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama ini belum terkelola dengan baik.

Akar permasalahan **“Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah”** dipicu oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Sistem pelayanan dan pelaporan yang masih manual, melalui prosedur yang panjang dan tidak update;
- b. Tingkat kepatuhan perusahaan perkebunan dalam menyampaikan laporan masih rendah;
- c. Mekanisme pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan belum didukung oleh deskripsi data yang rinci dan terintegrasi secara spasial;
- d. Kurangnya dukungan SDM dan infrastruktur dalam pengelolaan data di Kabupaten/ Kota;
- e. Perkebunan rakyat belum terdata dengan baik; dan
- f. Sistem pengelolaan data belum mengarah kepada integrasi pelaksanaan program kegiatan.

7. Masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya

perbaikan telah dilakukan. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing sub sektor perkebunan ditentukan oleh kerjasama sinergis (dan pembagian kerja) antar pengampu kepentingan, yaitu pemerintah atau masyarakat politik secara umum (*political society*), dunia usaha atau masyarakat bisnis (*business society*), dan masyarakat madani (*civil society*).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat regulasi agar pelaksanaan pengembangan sub sektor perkebunan benar-benar berjalan secara baik dan efisien. Kondisi ini sangat diperlukan, apalagi dalam menghadapi krisis multi dimensi yang terjadi saat ini. Kelembagaan yang ada masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertangguh struktur komoditas dan efisiensi dari seluruh rangkaian kegiatan. Kelembagaan petani masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan “**masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya regenerasi SDM di sektor Perkebunan;
- b. Perangkat Daerah (PD) yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota bergabung dengan sub sektor lain;
- c. Mutasi dan rotasi pegawai pada Dinas yang menangani Perkebunan di Kabupaten/ Kota menyebabkan kurang efektifnya koordinasi pelaksanaan pembangunan perkebunan;
- d. Masih lemahnya keberpihakan Lembaga keuangan untuk pengembangan komoditas Perkebunan;
- e. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan perkebunan belum optimal;
- f. Belum optimalnya dukungan SDM dan sarana prasarana;
- g. Belum terbentuknya lembaga korporasi pekebun; dan
- h. Kurangnya fasilitasi dan pendampingan kelembagaan pekebun.

8. Terdampaknya usaha perkebunan akibat pandemi Covid-19

Pada bulan Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan masuknya kasus Covid-19 di Indonesia. Penyebaran virus corona atau Covid-19 di dunia, termasuk ke Indonesia berdampak ke sejumlah sektor usaha di Tanah Air. Mulai dari pariwisata hingga perdagangan, termasuk sektor pertanian. Namun demikian sektor perkebunan mampu bertahan dan dapat tumbuh positif serta menjadi penggerak dan pemulih ekonomi di masa Covid-19. Sub sektor perkebunan memiliki nilai ekonomi yang dapat membuat Kalimantan Timur bertahan dari kontraksi ekonomi. Hal tersebut karena sektor perkebunan memproduksi kebutuhan primer yang selalu menjadi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian dampak covid-19 menyebabkan terganggunya usaha perkebunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama dari terjadinya perubahan supply dan demand yang mempengaruhi harga komoditas perkebunan ditingkat petani.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan “**Terdampaknya usaha perkebunan akibat Covid-19**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

a. Fluktuasi Harga Pasar

Ketika melihat meningkatnya tingkat kepedulian, rekomendasi untuk “Jarak Sosial,” mengurangi perjalanan, menghindari keramaian, penutupan dan praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran Covid-19, konsumen akan membuat pilihan sulit tentang makanan, makan jauh dari rumah, dan tidak normalnya pengeluaran. Tentu situasi ini akan menciptakan pasar dan transaksi tidak normal, sehingga akan mempengaruhi stabilitas *supply* dan *demand* barang dan jasa serta harga yang dimungkinkan meningkat.

b. Rantai Pasokan Melambat dan Kekurangan

Karena logistik terganggu dan upaya-upaya memperlambat penyebaran virus, seperti penurunan *supply* dan *demand* CPO yang berakibat pula pada penurunan ekspor CPO ke sejumlah negara tujuan ekspor yang menerapkan *lockdown*.

c. Kesehatan Petani

Petani adalah populasi yang relatif lebih tua, dibandingkan dengan populasi pekerja umum. Sensus pada pelaku agri tahun 2017 menunjukkan usia rata-rata

operator pertanian hampir 58 tahun usianya, setidaknya sepuluh tahun lebih tua dari pekerja di sebagian besar sektor lainnya. Tidak seperti pekerja industri lainnya, operator pertanian, 26% berusia 65 tahun ke atas. 11,7% penuh dari operator pertanian utama berusia 75 tahun ke atas. Jika Covid-19 ini tidak terbendung hingga menembus petani dampaknya dan menimbulkan kepanikan aktivitas akan menambah keterpurukan produksi pangan. Data dari negara lain yang telah melakukan pengujian yang lebih luas menunjukkan bahwa Covid-19 memiliki tingkat keparahan yang jauh lebih tinggi bagi mereka yang berusia 60-an dan lebih tua, yang berarti bahwa rekomendasi pencegahan dan perlindungan harus menjadi perhatian serius pemerintah serta kesadaran masyarakat untuk waspada.

d. Meningkatnya PHK dan Pengangguran

Terjadinya penurunan jumlah pekerja di beberapa usaha perkebunan akibat diterapkannya protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

9. Belum siapnya industri hilir untuk mendukung ketersediaan pangan dan energi hijau untuk IKN

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang didalamnya juga menyangkut atau bersamaan dengan keputusan pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Hal ini merupakan peluang bagi Kalimantan Timur untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Dalam hal ini peluang terbesar adalah penyediaan pangan dan energi hijau berbasis kelapa sawit seperti yang tertuang dalam RPJMN dan RKP tahun 2022.

Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif dari produksi CPO kelapa sawit sampai dengan tahun 2020 sebanyak 3,89 juta Ton. Namun demikian masih ditemui kendala dalam hal mengoptimalkan pengolahan menjadi produk olahan pangan dan energi terbarukan *green fuel* berbasis kelapa sawit. Sementara itu, untuk komoditas lainnya seperti: kakao, aren, lada, dan kelapa dalam dirasa belum mencukupi dalam aspek produksi dan pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan pangan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan “**Belum siapnya industri hilir untuk mendukung ketersediaan pangan dan energi hijau IKN**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Produksi komoditas non sawit masih belum tercukupi luas dan produktivitasnya;
- b. Minat investasi masih didominasi oleh usaha pembangunan kebun dan sangat sedikit investasi pada industri pengolahan;
- c. Tingginya biaya produksi yang disebabkan oleh rendahnya fasilitas infrastruktur yang menyebabkan inefisiensi ekonomi yang menghambat minat investor untuk berinvestasi di industri pengolahan subsektor perkebunan; dan
- d. Kebijakan dan regulasi di sektor energi dan listrik menghambat inisiatif perusahaan perkebunan untuk mengembangkan energi berbasis bio massa dan limbah kelapa sawit.

II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur

Meningkatkan pelayanan merupakan suatu tantangan untuk menjadi lebih baik kondisi umum dilihat dari analisis SWOT (*Strenght-Weakness-Oportunity-Treat*) terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki :

- Ketersediaan ruang/lahan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota untuk pengembangan subsektor perkebunan;
- Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat;
- Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai;
- Kualitas SDM aparatur Dinas Perkebunan cukup memadai;
- Dukungan dari mitra Pembangunan dan LSM dalam pengembangan perkebunan;
- Tersedianya kawasan areal perkebunan yang cukup luas; dan
- Kontribusi subsektor perkebunan terhadap pembangunan daerah cenderung meningkat.

2. Peluang (*Opportunities*) yang dimiliki :

- Kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan;
- Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pengelolaan SDA terbarukan;
- Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif;
- Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif;
- Adanya pengaruh globalisasi yang memudahkan jaringan dan akses pemasaran komoditi perkebunan;
- Ketergantungan masyarakat akan komoditi perkebunan cukup tinggi;
- Pemenuhan pangan dan energi hijau untuk pemenuhan Ibu Kota Negara (IKN) baru; dan
- Dukungan kebijakan dan regulasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Kelemahan (*Weaknesses*) yang dimiliki :

- Belum lengkap dan akuratnya *database* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur;
- Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal;
- Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan;
- Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai;
- Lemahnya penegakan hukum;
- Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* belum berjalan baik;
- Perijinan sektor perkebunan banyak yang tidak *clear* dan *clean*;
- Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat;
- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih rendah;
- Lambatnya regenerasi untuk menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun; dan
- Rendahnya produktivitas kebun dan rendahnya nilai tambah hasil perkebunan.

4. Ancaman (*Threats*) yang dimiliki :

- Praktek perijinan usaha perkebunan di masa lalu yang tidak tertib menimbulkan permasalahan tumpang tindih peruntukan lahan dan menyebabkan konflik;
- Kolaborasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung usaha perkebunan antar OPD belum optimal;
- Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan;
- Adanya tuntutan global untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor landbase;
- Isu kehilangan keanekaragaman hayati akibat pembukaan lahan untuk perkebunan;
- Infrastruktur jalan pada areal perkebunan masih terbatas;
- Berkurangnya tenaga kerja subsektor perkebunan;
- Fluktuasi harga komoditas perkebunan yang tidak dapat dikendalikan;
- Lambatnya hilirisasi untuk menampung dan mengolah produk hasil perkebunan; dan
- Terhambatnya usaha perkebunan akibat pandemi Covid-19.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- a. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang perkebunan;
- b. Pemberdayaan kualitas dan peningkatan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumber daya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal;
- c. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar satuan kerja, baik internal maupun eksternal;
- d. Optimalisasi pemanfaatan pola ruang subsektor perkebunan;
- e. Fokus pada pelaksanaan pembangunan kawasan perkebunan berbasis korporasi yang mengintegrasikan aspek hulu hilir;
- f. Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan program kegiatan yang tepat untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan secara berkelanjutan;
- g. Peningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur;

- h. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang yang konkrit, inovatif, partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi hulu hilir berorientasi hasil untuk menyelesaikan permasalahan yang berdampak langsung kepada masyarakat;
- i. Penguatan kelembagaan yang menangani sub sector perkebunan di Kabupaten/Kota; dan
- j. Tersedia nya anggaran yang memadai untuk pencapaian target indikator Program/Kegiatan yang telah ditetapkan.

II. 5. Review Terhadap Rancangan P-RKPD

Terlihat bahwa untuk program – program prioritas seperti Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; Program perizinan Usaha Pertanian; dan Program Penyuluhan Pertanian yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan PD telah terakomodasi dalam Rancangan P-RKPD (Tabel TC. 31).

II. 6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat di atasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah.

Adapun program-program prioritas subsektor perkebunan yang langsung berkaitan dan menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Perkebunan;

2. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca;
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan;
4. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
5. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
7. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
8. Program perizinan Usaha Pertanian; dan
9. Program Penyuluhan Pertanian.

Berikut beberapa program dan kegiatan yang akan disinkronkan pada forum perangkat dengan OPD Kabupaten/Kota yang diakomodir dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

III. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa di kategorikan sebagai berikut :

1. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi;
2. Defisit perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
3. Status dan luas kepemilikan lahan;
4. Pendidikan dan usia petani;
5. Kemiskinan pedesaan;
6. Dampak disrupsi revolusi industri 4.0;
7. Dampak perubahan iklim (DPI); dan
8. Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani.

Sedangkan dalam pembangunan perkebunan tantangan yang harus dihadapi antara lain:

1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya);
2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015);
3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas);
4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT);
5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan);
6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku); dan

7. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari globalisasi produksi dan pasar).

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah: ***“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan pertanian tahun 2020-2024, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah ***“Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”***.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menetapkan 7 misi pembangunan nasional di antaranya adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024, terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang menjadi koridor perumusan strategi Kementerian Pertanian sebagai berikut.

- a) Arah kebijakan 1: Terjaganya ketahanan pangan nasional Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya menjaga ketahanan pangan nasional dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan strategis; b) Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional; c) Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan; d) Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbenihan; e) Perlindungan Tanaman dari OPT dan DPI; f) Memperpendek rantai pasok; g) Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan; h) Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian; dan i) Inovasi pertanian bioindustry.
- b) Arah kebijakan 2: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian Nilai tambah pertanian menggambarkan kemampuan industri pertanian untuk menciptakan pendapatan baik bagi pelaku usaha pertanian, pendapatan wilayah maupun pendapatan nasional. Peningkatan nilai tambah pertanian diharapkan juga dapat mendongkrak daya saing pertanian Indonesia.

Peningkatan daya saing pertanian menunjukkan peningkatan inovasi pertanian guna menciptakan keunggulan komoditas pertanian Indonesia terhadap komoditas pertanian negara lain. Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan pemasaran dan investasi; b) Penerapan standarisasi dan mutu hasil; c) Penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan; d) Peningkatan Nilai Tambah produk pertanian; e) Penguatan sistem perkarantina; f) Digitalisasi dan percepatan perikanan; dan g) Pengembangan industri pertanian berbasis kawasan.

- c) Arah kebijakan 3: Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian Keberlanjutan merupakan isu internasional yang secara serentak di implementasikan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Keberlanjutan sumber daya pertanian yaitu menjamin ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan pertanian hingga masa mendatang dan memastikan generasi selanjutnya masih dapat menyelenggarakan pertanian. Kebutuhan penyelenggaraan pertanian didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sebagai kebutuhan dasar infrastruktur pertanian, meliputi air, lahan, pupuk dan pestisida, pembiayaan, serta alat dan mesin pertanian. Kebutuhan dasar tersebut menjadi enabler dalam mencapai target produksi komoditas strategis nasional. Upaya menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian, serta menjaga ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; b) Pengelolaan air untuk pertanian secara berkesinambungan; c) Pengembangan Mekanisasi Pertanian; d) Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian; e) Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian; dan f) Penerapan teknologi untuk pengembangan sumber daya lahan.
- d) Arah kebijakan 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian Sumber daya manusia pertanian adalah salah satu modal utama penyelenggaraan pertanian. Peningkatan kualitas bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Peningkatan kompetensi SDM pertanian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dilaksanakan melalui strategi: a) Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian; b) Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian; c) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi

informasi dan komunikasi; d) Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional; e) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi; dan f) Penguatan kelembagaan petani.

e) Arah kebijakan 5: Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Implementasi Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 bertema “Pemerintahan Berkelas Dunia” dimana diharapkan penyelenggaraan birokrasi di Indonesia akan lebih akuntabel, profesional dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab kolektif dari setiap individu yang menjadi bagian dari Kementerian Pertanian. Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dilaksanakan melalui strategi: a) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan c) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Sedangkan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar III.1 Kerangka Strategi Pembangunan Perkebunan Nasional



Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana

kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024:

- a) Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;
- b) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
- c) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
- d) Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI;
- e) Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan; dan
- f) Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian. Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur inilah yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

III.2.1. Tujuan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dari Renja tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun kedepan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan serta sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 adalah meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan.

III.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana dalam Rencana Starategi (Renstra) 2019-2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama adalah meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional yang mempunyai strategi/kebijakan sebagai berikut :
 - a. Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan
 - Peningkatan produksi komoditi perkebunan
 - b. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat
 - Peningkatan produk primer menjadi beberapa produk turunan lainnya
 - Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan
 - Peningkatan pemasaran produk perkebunan dengan standarisasi tinggi dan berorientasi ekspor
 - Membangun outlet-outlet pemasaran produk olahan Perkebunan
2. Misi Kedua adalah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan yang mempunyai strategi/kebijakan sebagai berikut :
 - a. Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan)
 - Mendorong peningkatan luas komoditas non sawit
 - b. Perluasan kebun di arahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah
 - Peningkatan luasan lahan pada perkebunan rakyat
 - c. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
 - Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang
 - d. Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid
 - Peningkatan pengelolaan data dan informasi perkebunan

- e. Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan
 - Peningkatan efektivitas pengawasan usaha perkebunan yang berkelanjutan
 - Melakukan penataan dan penertiban perijinan usaha Perkebunan
- f. Melindungi area cadangan karbon tinggi pada areal perkebunan
 - Penanganan hama dan penyakit
 - Efektivitas Mitigasi Emisi GRK
 - Penanganan lahan berkonservasi tinggi dan pengendalian kebakaran
- g. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan
 - Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dan kebun kemitraan
 - Penanganan konflik perkebunan
- h. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat
 - Memperpendek mata rantai pemasaran produk pekebun rakyat

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Perkebunan dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai pada periode 2019-2023 sebagai berikut :

a. Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan, dengan indikator :

- Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)

b. Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan, dengan indikator :

- Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (Perusahaan)

c. Meningkatkan kesejahteraan pekebun, dengan indikator :

- NTP Perkebunan Rakyat (%)

III.3. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

A. Program

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang terkait dengan pelayanan administratif perkantoran / pelayanan publik dan program yang terkait dengan pembangunan langsung kepada masyarakat pekebun.

Program pembangunan perkebunan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan perkebunan selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Dinas Perkebunan pada tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administratif

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Program Pembangunan Perkebunan

- a. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- d. Program perizinan Usaha Pertanian; dan
- e. Program Penyuluhan Pertanian.

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan pada visi dan misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 serta mengacu pada RKPD 2022, dapat dijabarkan ke dalam aktivitas atau kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang terkait dengan pelayanan administrasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; dan
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 4) Administasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - d) Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - c) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Kegiatan yang terkait dengan pembangunan

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengawasan sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian.
- 2) Pengawasan Mutu, penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih; dan
 - b) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
 - c) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

d. Program Perizinan Usaha Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

e. Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN.
- 2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan
 - b) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.
- 3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani;

- b) Pendampingan Manajemen Koorporasi petani;
- c) Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani; dan
- d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

Adapun total anggaran indikatif kebutuhan anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2021 untuk Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) UPTD adalah dari **Rp. 54.524.471.000,-** menjadi **Rp. 47.398.345.000,-** (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) atau berkurang Rp. 7.126.126.000,-. Total anggaran dinas sebesar Rp. 36.714.603.119,- UPTD PBP sebesar Rp. 4.371.175.060,- UPTD P2TP sebesar Rp. 2.239.603.321,- dan UPTD PBTP sebesar Rp. 4.072.963.500,-.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2021 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2021, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2021, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD Tahun 2021. Namun, sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun nasional, evaluasi kinerja Renja Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2021.

4.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah dialokasikan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Organisasi	RKPD 2021 (Rp)	Perubahan RKPD 2021 (Rp)	+/- (Rp)
Dinas perkebunan	Rp. 52.263.542.000,-	Rp. 47.398.345.000,-	Rp. 4.865.197.000,-
Dinas perkebunan	Rp. 46.480.542.000,-	Rp. 36.714.603.119,-	- Rp. 9.765.938.881,-
UPTD PBP	Rp. 934.000.000,-	Rp. 4.371.175.060,-	Rp. 3.437.175.060,-
UPTD P2TP	Rp. 1.219.000.000,-	Rp. 2.239.603.321,-	Rp. 1.020.603.321,-
UPTD PBTP	Rp. 3.630.000.000,-	Rp. 4.072.963.500,-	Rp. 442.963.500,-

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan

Secara garis besar, pemerintah daerah telah berupaya optimal menekan adanya SiLPa pada tahun sebelumnya. Namun pada beberapa Perangkat Daerah memerlukan strategi yang relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada pengoptimalan capaian positif kinerja pembangunan di tahun berkenaan.

Program/kegiatan yang merupakan penjabaran pagu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dituangkan pada tabel dibawah.

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3	Urusan Pilihan						
3.03	Pertanian						
3.03.01	Dina Perkebunan				52.263.542.000		47.398.345.000
3.03.01.1	Dinas Perkebunan						
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		86%	26.627.542.000	86%	21.363.827.609
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70%	1.085.000.000	70%	963.125.413
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	10 dokumen	485.000.000	10 dokumen	415.089.900
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	4 laporan	600.000.000	4 laporan	548.035.513
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 bulan	18.411.759.400	12 bulan	15.354.114.750
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	Samarinda	28 dokumen	17.112.809.400	28 dokumen	14.906.274.750

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		<i>Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan</i>		12 laporan		12 laporan	
3.27.01.1.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	<i>Samarinda</i>	12 bulan	1.298.950.000	12 bulan	447.840.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		20%	846.000.000	20%	40.400.000
3.27.01.1.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah pendidikan dan pelatihan formal</i>	<i>Samarinda</i>	70 orang	846.000.000	10 orang	40.400.0000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu		14 unit	2.456.932.600	5 unit	1.566.653.674
3.27.01.1.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>Samarinda</i>	270 unit	30.500.000	114 unit	9.935.168
3.27.01.1.06.02	<i>Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor</i>	<i>Samarinda</i>	4 unit	137.872.500	4 unit	100.914.000
3.27.01.1.06.04	<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>	<i>Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat</i>	<i>Samarinda</i>	12 bulan	542.760.100	12 bulan	364.205.240
		<i>Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor</i>		12 bulan		12 bulan	
3.27.01.1.	<i>Penyediaan barang cetakan</i>	<i>Jumlah barang</i>	<i>Samarinda</i>	85.100	69.700.000	47.240 lembar	36.199.266

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
06.05	dan penggandaan	cetakan dan penggandaan		lembar			
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Samarinda	6.960 eksemplar	20.600.000	1500 eksemplar	9.600.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	16 kegiatan	1.655.500.000	4 kegiatan	1.045.800.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah		26 jenis	891.000.000	8 jenis	207.959.810
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	Samarinda	79 unit	891.000.000	34 unit	207.959.810
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah		12 jenis	1.447.100.000	4 jenis	2.455.894.162
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Samarinda	2825 lembar	15.950.000	750 lembar	7.500.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	12 bulan	843.900.000	12 bulan	494.401.410
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan	Samarinda	4 unit	587.250.000	1 unit	231.890.600

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		<i>perlengkapan kantor</i>					
3.27.01.1.08.04	<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	<i>Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran</i>	<i>Samarinda</i>	<i>12 bulan</i>	<i>0</i>	<i>12 bulan</i>	<i>1.722.102.152</i>
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara		<i>12 jenis</i>	<i>1.489.750.000</i>	<i>3 jenis</i>	<i>777.773.800</i>
3.27.01.1.09.02	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	<i>Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	<i>Samarinda</i>	<i>18 unit</i>	<i>380.750.000</i>	<i>21 unit</i>	<i>278.612.800</i>
3.27.01.1.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	<i>Samarinda</i>	<i>4 unit</i>	<i>934.030.150</i>	<i>2 unit</i>	<i>405.888.000</i>
3.27.01.1.09.10	<i>Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	<i>Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor</i>	<i>Samarinda</i>	<i>4 unit</i>	<i>174.969.850</i>	<i>9 unit</i>	<i>91.179.000</i>
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)		17.136.849,15 ton	6.005.000.000	17.136.849,15 ton	5.095.571.200
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)		17.036.402 ton		17.036.402 ton	
		Produksi Komoditi Perkebunan (karet)		77.763 ton		77.763 ton	
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)		12.479 ton		12.479 ton	
		Produksi Komoditi		3.771 ton		3.771 ton	

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		Perkebunan (kakao)					
		Produksi Komoditi Perkebunan (lada)		6.434 ton		6.434 ton	
		Produksi Komoditi Perkebunan (pala)					
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis		18.4 ton/ha	<i>6.005.000.000</i>	18.4 ton/ha	<i>5.095.571.200</i>
3.27.02.1.01.01	<i>Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian</i>	<i>Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)</i>	<i>Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan</i>	<i>20 ton/ha</i>	<i>6.005.000.000</i>	<i>20 ton/ha</i>	<i>5.095.571.200</i>
		<i>Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)</i>		<i>1.40 ton/ha</i>		<i>1.40 ton/ha</i>	
		<i>Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)</i>		<i>0.82 ton/ha</i>		<i>0.82 ton/ha</i>	
		<i>Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)</i>		<i>0.75 ton,ha</i>		<i>0.75 ton,ha</i>	
		<i>Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)</i>		<i>1.18 ton/ha</i>		<i>1.18 ton/ha</i>	
		<i>Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian</i>		<i>1 dokumen</i>		<i>1 dokumen</i>	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan		30 kelompok tani	<i>7.995.000.000</i>	30 kelompok tani	<i>6.274.537.200</i>

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		(Kelompok Tani)					
		Luas kebun yang dibangun (Ha)		1.425.580 ha		1.425.580 ha	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)		670 ha	7.995.000.000	670 ha	6.274.537.200
3.27.03.1.01.01	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian		Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan		7.995.000.000		6.274.537.200
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)		200 ha		200 ha	
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)		100 ha		100 ha	
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)		20 ha		20 ha	
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)		100 ha		100 ha	
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)		200 ha		200 ha	
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)		50 ha		50 ha	
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)		50 ha		50 ha	
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)		4,079 juta ton CO2eq	1.219.000.000	4,079 juta ton CO2eq	932.440.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:			1.219.000.000		932.440.000
		a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)		128 pelaku usaha		128 pelaku usaha	
		b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)		5 konflik		5 konflik	
3.27.05.1.01.02	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	1 PMS	632.000.000	1 PMS	490.190.000
		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi		102.000 ha		102.000 ha	
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	15 KTPA	587.000.000	15 KTPA	442.250.000
		Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani		5 konflik		5 konflik	
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)		35 perusahaan	784.000.000	35 perusahaan	560.675.000
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)		87 perusahaan	784.000.000	87 perusahaan	560.675.000

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	35 lembaga pekebun	784.000.000	35 lembaga pekebun	560.675.000
		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina		52 perusahaan		52 perusahaan	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)		1 lembaga	3.850.000.000		2.487.552.110
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)		25 orang	277.240.000	25 orang	250.412.000
3.27.07.1.01.01	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	1 kegiatan	277.240.000	1 kegiatan	250.412.000
3.27.07.1.02	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)		31 kelompok tani	1.602.615.000	31 kelompok tani	1.004.691.850
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)		1 unit		1 unit	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar,	5 unit	1.068.790.000	5 unit	775.351.250

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	<i>pertanian</i>	<i>Jumlah promosi yang diikuti</i>	<i>Samarinda dan Balikpapan</i>	<i>10 event</i>		<i>10 event</i>	
3.27.07.1.02.02	<i>Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani</i>	<i>Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani</i>	<i>Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan</i>	20 pertemuan	533.825.000	20 pertemuan	229.340.600
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)		20 lembaga	1.970.145.000	20 lembaga	1.232.448.260
		Jumlah kelompok tani yang produksinya memenuhi SNI		4 Kelompok tani		4 Kelompok tani	
3.27.07.1.03.01	<i>Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani</i>	<i>Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk</i>	<i>Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan</i>	24 lembaga	552.475.000	24 lembaga	273.234.500
3.27.07.1.03.02	<i>Pendampingan manajemen korporasi petani</i>	<i>Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina</i>	<i>Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan</i>	9 unit	662.793.000	9 unit	411.308.260
3.27.07.1.03.03	<i>Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani</i>	<i>Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI</i>	<i>Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan</i>	6 kali	518.417.000	6 kali	329.445.500
3.27.07.1.03.04	<i>Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani</i>	<i>Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani</i>	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	1 pertemuan	236.460.000	1 pertemuan	218.460.000

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN				934.000.000		4.371.175.060
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		%	0	86%	1.373.779.060
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		bulan	0	12 bulan	92.520.000
3.27.01.1.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	Samarinda	bulan	0	12 bulan	92.520.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		%	0	20%	-
3.27.01.1.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah pendidikan dan pelatihan formal</i>	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	orang	0	18 orang	-
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu		unit	0	3 unit	167.848.975
3.27.01.1.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor</i>	Samarinda	unit	0	12 unit	4.569.398
3.27.01.1.06.02	<i>Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan peralatan</i>	Samarinda	unit	0	4 unit	18.843.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		<i>dan kelengkapan kantor</i>					
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	Samarinda	bulan	0	12 bulan	36.492.100
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor		bulan		12 bulan	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	lembar	0	500 lembar	5.625.500
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Samarinda	eksemplar	0	720 eksemplar	2.720.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	kegiatan	0	2 kegiatan	99.600.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah		jenis	0	6 jenis	392.124.911
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	Samarinda	unit	0	15 unit	392.124.911
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah		jenis	0	3 jenis	417.168.774

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Samarinda	lembar	0	240 lembar	2.400.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	bulan	0	12 bulan	85.504.446
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	unit	0	4 unit	172.052.200
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Samarinda	bulan	0	12 bulan	157.212.128
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara		<i>jenis</i>	0	<i>3 jenis</i>	304.116.400
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Samarinda	unit	0	2 unit	35.910.600
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Samarinda	unit	0	4 unit	250.770.800
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Samarinda	unit	0	4 unit	17.435.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah benih yang beredar		6.000.000 benih	934.000.000	6.000.000 benih	655.200.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi		6.000.000 benih	934.000.000	6.000.000 benih	655.200.000
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	2,58%	934.000.000	2,58%	655.200.000
3.27.03	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana kantor yang tersedia		Unit	0	2 Unit	2.342.196.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian		Unit	0	2 Unit	2.342.196.000
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah bangunan Gedung dan laboratorium yang direhab	Samarinda	unit	0	2 unit	2.342.196.000
	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				1.219.000.000		2.239.603.321
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		%	0	86%	1.445.810.721
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		bulan	0	12 bulan	94.254.000

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Samarinda	bulan	0	12 bulan	94.254.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Samarinda	%	0	20%	48.960.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	orang	0	8 orang	48.960.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu		unit	0	3 unit	230.685.766
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Samarinda	unit	0	75 unit	8.479.512
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	unit	0	1 unit	13.200.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	Samarinda	bulan	0	12 bulan	66.194.090
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor		bulan	0	12 bulan	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	lembar	0	13.100 lembar	19.907.404

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Samarinda	eksemplar	0	8 eksemplar	5.605.600
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	kegiatan	0	2 kegiatan	117.300.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah		<i>jenis</i>	0	9 jenis	223.760.000
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	Samarinda	unit	0	21 unit	223.760.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah		<i>jenis</i>	0	3 jenis	520.270.955
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Samarinda	lembar	0	395 lembar	4.972.500
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	bulan	0	12 bulan	210.882.127
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	unit	0	1 unit	147.204.200
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi	Samarinda	bulan	0	12 bulan	157.212.128

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		<i>perkantoran</i>					
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara		<i>jenis</i>	<i>0</i>	<i>3 jenis</i>	<i>327.880.000</i>
<i>3.27.01.1.09.02</i>	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	<i>Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	<i>Samarinda</i>	<i>unit</i>	<i>0</i>	<i>1 unit</i>	<i>35.180.000</i>
<i>3.27.01.1.09.09</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	<i>Samarinda</i>	<i>unit</i>	<i>0</i>	<i>1 unit</i>	<i>261.000.000</i>
<i>3.27.01.1.09.10</i>	<i>Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	<i>Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor</i>	<i>Samarinda</i>	<i>unit</i>	<i>0</i>	<i>4 unit</i>	<i>31.700.000</i>
3.27.05	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT		<i>1.047.138.860</i>	<i>1.219.000.000</i>	<i>1.047.138.860</i>	<i>793.792.600</i>
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)		<i>220 ha</i>	<i>1.219.000.000</i>	<i>220 ha</i>	<i>793.792.600</i>
<i>3.27.05.1.01.01</i>	<i>Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>	<i>Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)</i>	<i>Balikipapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	<i>220 ha</i>	<i>1.219.000.000</i>	<i>220 ha</i>	<i>793.792.600</i>
		<i>Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)</i>		<i>2 lembaga</i>		<i>2 lembaga</i>	

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)		600 liter		600 liter	
		Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)		2 jenis		2 jenis	
	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		4.796.741.594		3.630.000.000		4.072.963.500
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		%	0	86%	864.986.988
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		bulan	0	12 bulan	92.320.000
3.27.01.1.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	<i>Samarinda</i>	<i>bulan</i>	0	12 bulan	92.320.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		%	0	20%	52.280.000
3.27.01.1.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah pendidikan dan pelatihan formal</i>	<i>Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi</i>	<i>orang</i>	0	15 orang	52.280.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu		<i>unit</i>	0	3 unit	117.808.225

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Samarinda	unit	0	88 unit	4.534.925
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	unit	0	1 unit	440.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	Samarinda	bulan	0	12 bulan	54.006.250
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor			0		
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	lembar	0	2.960 lembar	2.307.050
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Samarinda	bulan	0	12 bulan	1.920.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	kegiatan	0	15 kegiatan	54.600.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah		jenis	0	3 jenis	29.698.900

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	Samarinda	unit	0	9 unit	29.698.900
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah		jenis	0	3 jenis	439.574.863
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Samarinda	lembar	0	210 lembar	2.100.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	bulan	0	12 bulan	112.243.003
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	unit	0	1 unit	128.716.700
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Samarinda	bulan	0	12 bulan	196.515.160
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara		jenis	0	3 jenis	133.305.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Samarinda	unit	0	2 unit	36.510.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Samarinda	unit	0	1 unit	58.520.000

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.27.01.1.09.10	<i>Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	<i>Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor</i>	<i>Samarinda</i>	unit	0	13 unit	38.275.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat		%	3.630.000.000	75%	3.207.976.512
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan		55.000 benih	3.630.000.000	55.000 benih	3.207.976.512
3.27.02.1.02.04	<i>Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan</i>	<i>Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar</i>	<i>Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim</i>	35.000 benih	3.630.000.000	35.000 benih	3.207.976.512
			<i>Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)</i>	15.000 benih		15.000 benih	
			<i>Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)</i>				
			<i>Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)</i>	10.000 benih		10.000 benih	
			<i>Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kaka)</i>	10.000 benih		10.000 benih	
			<i>Jumlah benih</i>				

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perubahan Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
			<i>tanaman tahunan dan penyegar (aren)</i>				
			<i>Jumlah benih tanaman semusim dan rempah</i>	20.000 benih		20.000 benih	
			<i>Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)</i>	10.000 benih		10.000 benih	
			<i>Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)</i>	10.000 benih		10.000 benih	
			<i>Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)</i>				

Bab V. Penutup

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 ini merupakan rancangan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Tahun 2019-2023 dan P-RKPD Tahun 2021. Perubahan Renja 2021 disusun sebagai rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Perubahan Rencana Kerja memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, estimasi tahun berjalan dan capaian Renstra dalam rangka pencapaian tujuan, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya manusia yang dimiliki dinas, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan yang berorientasi pada kebijakan program dengan menerapkan konsep pembangunan sistem dan usaha perkebunan berkelanjutan berbasis sumberdaya yang terbarukan.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 : ***“Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan untuk Mensejahterakan Masyarakat”*** (*The realization of sustainable plantation development for community welfare*).

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kiner Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	92 %	89,71	83	88,45	106,57			
3.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	60 Bulan	12	12	12	100,00			
3.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)	5 unit	5	5	5	100,00			
3.03.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	123 Unit	35	18	16	88,89			
3.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	60 Bulan	12	12	12	100,00			
3.03.01.08.05	Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah gedung di rehab sedang/berat	8 Unit	-	8	8	100,00			
3.03.01.08.06	Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah gedung di rehab sedang/berat	8 unit	0	6	0	-			
3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah daerah (%)	100 %	74	20	20	100,00			
3.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	20 Kegiatan	4	4	4	100,00			
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	20 Kegiatan	-	20	20	100,00			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	60 Bulan	-	12	12	100,00			
3.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	250 Orang	36	50	4	8,00			
		Jumlah pakaian dinas (Stell)	1.380 Stell	460		-				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kiner Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah (%)	80 %	69,93	68	72,63	106,81			
3.03.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	50 Dokumen	10	10	10	100,00			
3.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	20 Dokumen	4	4	4	100,00			
3.03.01.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874 Ton	14.145.414	16.812.938	16.809.560	99,98			
		a. Kelapa Sawit (Ton TBS)	18.197.504 Ton	14.067.789	16.717.254	16.717.254	100,00			
		b. Karet (Ton)	90.000,00 Ton	59.917	74.060	70.682	95,44			
		c. Kelapa (Ton)	12.853,00 Ton	8.591	12.468	12.468	100,00			
		d. Kakao (Ton)	5.000,00 Ton	2.360	3.307	3.307	100,00			
		e. Lada (Ton)	8.517,00 Ton	6.757	5.849	5.849	100,00			
3.03.01.58.04	Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (ton/ha)								
		a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)	22 Ton/ha	16,9	19,5	20,70	106,15			
		b. Karet (Ton/Ha)	1,50 Ton/ha	1,3	1,4	1,44	106,67			
		c. Kelapa (Ton/Ha)	0,90 Ton/ha	0,6	0,8	0,75	93,75			
		d. Kakao (Ton/Ha)	0,85 Ton/ha	0,5	0,7	0,74	105,71			
		e. Lada (Ton/Ha)	1,20 Ton/ha	1,1	1,2	0,92	80,00			
3.03.01.58.05	Perluasan Komoditas Perkebunan Rakyat	Jumlah luas kebun (ha)	3.150 Ha	570	460	460	100,00			
		a. Kelapa Sawit (ha)	850 Ha	100	100	100	100,00			
		b. Karet (ha)	1.100 Ha	300	135	135	100,00			
		c. Kelapa (ha)	100 Ha	20	20	20	100,00			
		d. Kakao (ha)	550 Ha	100	80	80	100,00			
		e. Lada (ha)	550 Ha	50	125	125	100,00			
	Pengembangan Kelembagaan Pekebun	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (unit)	104 unit		20	20	100,00			
3.03.01.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,04 Juta Ton CO2eq	4	4,080	2,916	71,47			
3.03.01.76.01	Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah Perusahaan yang memanfaatkan limbah POME (Perusahaan)	1 Perusahaan	1						

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.03.01.76.03	Penanaman pada wilayah cadangan karbon rendah	Luas area yang ditanami (Ha)	50.000 ha	50.487						
3.03.01.76.04	Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)	11 PMS		1	1	100,00			
3.03.01.76.05	Perlindungan lahan konservasi di areal perkebunan	luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (ha)	103.000,00 ha		101.500	106.000	104,43			
3.03.01.76.06	Pengendalian kebakaran lahan perkebunan	Jumlah KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) yang dibentuk dan dibina (KTPA)	60 KTPA		5	6	120,00			
3.03.01.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	10 produk		2	1	50,00			
3.03.01.93.01	Pembinaan Pasca Panen Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang produksinya memenuhi SNI (kelompok tani)	16 KT		3	4	133,33			
3.03.01.93.02	Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Jenis Olahan Hasil Perkebunan (produk)	12 Produk		2	2	100,00			
3.03.01.93.03	Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	Jumlah promosi yang diikuti (event)	40 event		1	-	-			
3.03.01.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	140 Perusahaan	30	35	18	51,43			
3.03.01.80.01	Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Jumlah database dan data spasial (Database)	2 Database	2						
3.03.01.80.02	Pelayanan adminitrasi Perijinan	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP (Perusahaan)	10 Perusahaan	10						
3.03.01.80.03	Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi (Perusahaan)	20 Perusahaan	20						
3.03.01.80.04	Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang dimitrakan (Koperasi)	60 Koperasi		30	25	83,33			
3.03.01.80.05	Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan (konflik)	20 Konflik		5	6	120,00			
3.03.01.80.06	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang dibina (Perusahaan)	208 Perusahaan		52	21	40,38			
3.03.01.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar (benih)	11.860.704 benih		2.905.176	6.749.812	232,34			
3.03.01.94.01	Pengendalian dan pengawasan peredaran benih	Persentase peredaran benih yang illegitim (%)	1,58 %		3,08	3,07	99,68			
3.03.01.94.02	Pengujian dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang disertifikasi (benih)	8.000.000 benih		2.000.000	3.034.162	151,71			
3.03.01.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)	2.136.364.888 Rupiah		1.087.534.440	996.352.513	91,62			
3.03.01.95.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Luas lahan yang dikendalikan (Ha)	156 ha		229	209,8	91,62			
3.03.01.95.02	Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pesticida (BP)	Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)								
		- APH Padat	20.000 kg		5.000		-			

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kiner Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		- APH Cair	2.000 liter		500	500	100,00			
3.03.01.88	Program Penyediaan Bahan Tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	100 %		85	85	100,00			
3.03.01.88.03	Penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar	529.000		132.000	65.000	49,24			
		a. Kelapa Sawit (benih)	200.000 benih		50.000	25.000	50,00			
		b. Karet (benih)	200.000 benih		50.000	15.000	30,00			
		c. Kelapa (benih)	9.000 benih		2.000	25.000	1.250,00			
		d. Kakao (benih)	80.000 benih		20.000	-	-			
		e. Aren (benih)	40.000 benih		10.000	-	-			
3.03.01.88.04	Penyediaan benih tanaman semusim dan rempah	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	180.000		45.000	31.223	69,38			
		a. Lada (benih)	100.000 benih		25.000	13723	54,89			
		b. Pala (benih)	40.000 benih		10.000	10000	100,00			
		c. Sereh wangi ((benih)	40.000 benih		10.000	7500	75,00			
3.03.01.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)	20 %	20						
3.03.01.60.04	Penanganan konflik usaha perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)	20 %	20						
3.03.01.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Produk yang bersertifikat (%)	30 %	30						
3.03.01.61.01	Pembinaan pasca panen	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	3 KT	25						
3.03.01.61.04	Standarisasi mutu hasil perkebunan	Jumlah produk olahan yang disertifikasi (produk)	2 Produk	2						
3.03.01.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)	5 komoditi	5						
3.03.01.62.04	Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Jenis)	2 jenis	4						
3.03.01.62.05	Pengolahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan (Produk)	11 produk	11						
3.03.01.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)	5 komoditi	5						
3.03.01.65.05	Promosi produksi perkebunan	Jumlah transaksi (Transaksi)	50 transaksi	50						
3.03.01.65.06	Pengelolaan Informasi pasar	Jumlah data Informasi produk dan pasar (Informasi)	2 informasi	2						

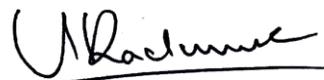
Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.03.01.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu (Kel. Tani)	2 KT	2						
3.03.01.68.02	Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah orang terlatih (Orang)	25 orang	50						
3.03.01.77	Program Konservasi Lahan dan Air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	50 %	50						
3.03.01.77.01	Perlindungan lahan perkebunan	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV (PBS)	60 PBS	60						
3.03.01.77.02	Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Jumlah sumber air yang dilindungi (Unit)	130 Unit	130						
3.03.01.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM Petani, petugas Lapang dan teknis Perkebunan (Orang)	25 orang	25						
3.03.01.78.01	Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan	Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang (Orang)	25 orang	25						
3.03.01.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	5 gapoktan	5						
3.03.01.79.01	Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani (Kel. Tani)	30 KT	30						
3.03.01.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)	20 kelompok	20						
3.03.01.81.01	Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Jumlah kemitraan usaha perkebunan (Kelompok)	20 kelompok	20						
3.03.01.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)	5 komoditi	5						
3.03.01.82.01	Pembinaan pengolahan produk perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	5 KT	10						
3.03.01.82.02	Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Persentase peningkatan produksi (%)	15 %	15						
3.03.01.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Presentase kebakaran kebun yang dikendalikan (%)	40 %	80						
3.03.01.83.01	Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	Luas kebakaran kebun (ha)	99 ha	50						

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.03.01.84	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)	2 kasus	2						
3.03.01.84.01	Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)	2 sumber benih	3						
3.03.01.84.02	Pengawasan peredaran benih	Jumlah benih yang diawasi (Benih)	2.000.000 benih	2.486.546						
3.03.01.85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	2.000.000 benih	2.486.546						
3.03.01.85.01	Pengujian benih	Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa) (Jenis)	1 jenis	1						
3.03.01.85.02	Sertifikasi benih	jumlah benih tersertifikasi dan berlabel (benih)	2.000.000 benih	2.486.546						
3.03.01.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)	25 kelompok	25						
3.03.01.86.01	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT (Kelompok Tani)	25 KT	25						
3.03.01.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)	5.000 kg	5.000						
3.03.01.87.01	Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah APH/BP (Kg/liter)	5.000 kg	5.000						
3.03.01.88	Program penyediaan bahan tanaman	Presentase pemenuhan bibit unggul perkebunan secara mandiri (%)	75 %	100						
3.03.01.88.01	Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah benih komoditas perkebunan (benih)	25.000 Orang	24.812						
	Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dipelihara(Ha)	12 ha	12						
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan	92 %					86	84,83	92,21
3.27.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74 nilai					70	72,63	98,15
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	36 bulan					12	9	45,00
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %					20	7	35,00
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 unit					5	5	22,73

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	22 jenis					8	8	36,36
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis					3	3	100,00
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 jenis					3	3	100,00
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874 ton					17.136.849	17.792.792	97,15
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20,03 ton/ha					18,4	16,18	80,78
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	1.500.674 ha					1.425.580	1.540.488	102,65
		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan	90 Kelompok Tani					30	34	37,78
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	1.910 ha					670	670	35,08
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,04 ton CO2Eq					4,079	6,02	4,56
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK	132 pelaku usaha					128	106	80,30
		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan	15 pelaku usaha					5	5	33,33
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan					35	10	28,57
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan					87	81	75,70
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	3 lembaga					1	-	-
3.27.007.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	75 orang					25	25	33,33
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	93 Kelompok Tani					31	12	12,90
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	3 unit					1	1	33,33
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	60 lembaga					20	14	23,33

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kiner Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	12 kelompok tani					4	2	16,67
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	6.000.000 benih					6.000.000	5.627.144	93,79
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi	6.000.000 benih					6.000.000	1.297.566	21,63
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774.940.000 Juta					1.047.138.860	942.424.900	82,23
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156 ha					220	198	78,79
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	85 %					75%	-	-
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	155.000 benih					55.000	55.000	35,48

Samarinda, 2021
KEPALA,


Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan awal P-RKPD tahun 2021
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	RANCANGAN AWAL P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
DINAS PERKEBUNAN					40.414.587.396						36.714.603.119
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%	21.948.799.396	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%	21.363.827.609	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70	1.305.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70	963.125.413	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	535.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	415.089.900	
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	770.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	548.035.513	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	15.354.114.750	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	15.354.114.750	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	14.906.274.750	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	14.906.274.750	
			Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan				Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan		
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	447.840.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	447.840.000	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	207.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	40.400.000	
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	70 Orang	207.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	40.400.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	5 Unit	1.602.653.674	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	5 Unit	1.566.653.674	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	114 Unit	9.935.168	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	114 Unit	9.935.168	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	100.914.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	100.914.000	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	364.205.240	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	364.205.240	
			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan		
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	36.199.266	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	36.199.266	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500 Eksemplar	9.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500 Eksemplar	9.600.000	

Kode	RANCANGAN AWAL P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	4 Kegiatan	1.081.800.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	4 Kegiatan	1.045.800.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	9 Jenis	246.349.810	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	9 Jenis	207.959.810
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	34 Unit	246.349.810	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	34 Unit	207.959.810
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	2.455.907.362	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	2.455.894.162
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	750 Lembar	7.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	750 Lembar	7.500.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	494.401.410	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	494.401.410
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	231.903.800	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	231.890.600
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1.722.102.152	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1.722.102.152
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	777.773.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	775.679.800
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21 Unit	278.612.800	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21 Unit	278.612.800
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	407.982.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	405.888.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	2 Unit	91.179.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	2 Unit	91.179.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	17.136.849,15	5.645.778.000	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	17.136.849,15	5.095.571.200
			Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	17.036.402				Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	17.036.402	
			Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	77.763				Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	77.763	
			Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.479				Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.479	
			Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	3.771				Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	3.771	
			Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	6.434				Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	6.434	
			Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,15				Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,15	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Produktivitas komoditas perkebunan strategis	18,4 Ton/Ha	5.645.778.000	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Produktivitas komoditas perkebunan strategis	18,4 Ton/Ha	5.095.571.200
3.27.02.1.01.01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	0,75 Ton/Ha	5.645.778.000	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	0,75 Ton/Ha	5.095.571.200
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,4 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,4 Ton/Ha	

Kode	RANCANGAN AWAL P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,82 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,82 Ton/Ha	
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	20 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	20 Ton/Ha	
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,18 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,18 Ton/Ha	
			Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen				Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30	7.377.180.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30	6.274.537.200
			Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.425.580				Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.425.580	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	670 Ha	7.377.180.000	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	670 Ha	6.274.537.200
3.27.03.1.01.01	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	200 Ha	7.377.180.000	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	200 Ha	6.274.537.200
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	- Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	- Ha	
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,079 Ton CO2Eq	1.062.700.000	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,079 Ton CO2Eq	932.440.000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	133	1.062.700.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	133	932.440.000
			a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)	128				a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)	128	
			b.Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)	5				b.Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)	5	
3.27.05.1.01.02	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	542.000.000	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	490.190.000
			Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.000 Ha				Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.000 Ha	
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	520.700.000	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	442.250.000
			Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik				Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik	

Kode	RANCANGAN AWAL P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian		Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	710.250.000	Program perizinan Usaha Pertanian		Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	560.675.000
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	87 Perusahaan	710.250.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	87 Perusahaan	560.675.000
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	35 Lembaga Pekebun	710.250.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	35 Lembaga Pekebun	560.675.000
			Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan				Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	3.669.880.000	Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	2.487.552.110
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	277.240.000	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	250.412.000
3.27.07.1.01.01	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	277.240.000	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	250.412.000
3.27.07.1.02	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	1.602.615.000	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	1.004.691.850
			Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit				Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	5 unit	1.068.790.000	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	5 unit	775.351.250
			Jumlah promosi yang diikuti	10 event				Jumlah promosi yang diikuti	10 event	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	533.825.000	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	229.340.600
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	1.790.025.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	1.232.448.260
			Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT				Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT	
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	24 Lembaga	552.475.000	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	24 Lembaga	273.234.500
3.27.07.1.03.02	Pendampingan manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	9 Unit	482.673.000	Pendampingan manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	9 Unit	411.308.260

Kode	RANCANGAN AWAL P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.07.1.03.03	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 Kali	518.417.000	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 Kali	329.445.500
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	236.460.000	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	218.460.000
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN					4.540.672.984	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan				4.371.175.060
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%	1.514.076.984	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%	1.373.779.060
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	92.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	92.520.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	162.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	-
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	18 Orang	162.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	18 Orang	-
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	3 Unit	109.355.810	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	3 Unit	167.848.975
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Unit	4.569.398	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Unit	4.568.375
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	23.266.012	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	18.843.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	36.492.100	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	36.492.100
			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	5.625.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	5.625.500
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	720 Eksemplar	2.802.800	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	720 Eksemplar	2.720.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	2 Kegiatan	36.600.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	2 Kegiatan	99.600.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	422.740.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	392.124.911
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	422.740.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	392.124.911

Kode	RANCANGAN AWAL P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	421.940.774	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	417.168.774
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	2.400.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	2.400.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	85.504.446	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	85.504.446
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	176.824.200	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	172.052.200
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	157.212.128	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	157.212.128
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	305.520.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	304.116.400
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	35.910.600	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	35.910.600
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	252.174.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	250.770.800
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	4 Unit	17.435.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	4 Unit	17.435.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	684.400.000	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	655.200.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	684.400.000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	655.200.000
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Persentase Peredaran Benih yang Illegitim	2,58%	684.400.000	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Persentase Peredaran Benih yang Illegitim	2,58%	655.200.000
			Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih				Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana kantor yang tersedia	2 Unit	2.342.196.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana kantor yang tersedia	2 Unit	2.342.196.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian	2 Unit	2.342.196.000	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian	2 Unit	2.342.196.000
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Samarinda	Jumlah bangunan gedung dan Laboratorium yang direhab	2 Unit	2.342.196.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Samarinda	Jumlah bangunan gedung dan Laboratorium yang direhab	2 Unit	2.342.196.000
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN						2.663.869.026	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan			2.239.603.321
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%	1.574.657.026	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%	1.445.810.721
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	94.560.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	94.254.000

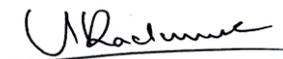
Kode	RANCANGAN AWAL P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	94.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	94.254.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	72.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	48.960.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	72.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	48.960.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	334.077.371	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	230.685.766
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor	75 Unit	9.975.896	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75 Unit	8.479.512
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	13.200.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	13.200.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	77.875.400	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	66.194.090
			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	23.420.475	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	19.907.404
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 Eksemplar	5.605.600	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 Eksemplar	5.604.760
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	2 Kegiatan	204.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	2 Kegiatan	117.300.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	9 Jenis	223.985.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	9 Jenis	223.760.000
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	21 Unit	223.985.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	21 Unit	223.760.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	522.124.655	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	520.270.955
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	5.850.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	4.972.500
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	210.882.127	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	210.882.127
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	148.180.400	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	147.204.200
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	157.212.128	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	157.212.128
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	327.910.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	327.880.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	35.210.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	35.180.000

Kode	RANCANGAN AWAL P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	261.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	261.000.000	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	4 Unit	31.700.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	4 Unit	31.700.000	
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	1.047.138.860	1.089.212.000	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	1.047.138.860	793.792.600	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	220 Ha	1.089.212.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	220 Ha	793.792.600	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	220 Ha	1.089.212.000	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	220 Ha	793.792.600	
			Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga				Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga		
			Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	0 KG				Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	0 KG		
			Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter				Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter		
			Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis				Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis		
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN					4.644.341.594	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan					4.072.963.500
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%	1.014.341.594	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%	864.986.988	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.320.000	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	92.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	92.320.000	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	135.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	52.280.000	
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	135.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	52.280.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	182.399.318	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	117.808.225	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	88 Buah	6.014.618	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	88 Buah	4.534.925	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	825.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	440.000	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	64.187.200	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	54.006.250	
			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan		
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2960 Lembar	4.452.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2960 Lembar	2.307.050	

Kode	RANCANGAN AWAL P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Eksemplar	1.920.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Eksemplar	1.920.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	15 Kegiatan	105.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	15 Kegiatan	54.600.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	3 Jenis	29.780.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	3 Jenis	29.698.900
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	9 Unit	29.780.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	9 Unit	29.698.900
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	441.337.276	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	439.574.863
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	210 Lembar	2.100.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	210 Lembar	2.100.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	113.473.916	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	112.243.003
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	129.248.200	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	128.716.700
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	196.515.160	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	196.515.160
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	133.305.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	133.305.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	36.510.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	36.510.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	58.520.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	58.520.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	38.275.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	38.275.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	3.630.000.000	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	3.207.976.512
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	3.630.000.000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	3.207.976.512
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	35.000 Benih	3.630.000.000	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	35.000 Benih	3.207.976.512
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	15.000 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	15.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	0 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	0 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	10.000 Benih	

Kode	RANCANGAN AWAL P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	0 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	0 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	20.000 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	20.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	0 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	0 Benih	
TOTAL					52.263.471.000					47.398.345.000

Samarinda, 2021
KEPALA,



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852, 748660 Fax. (0541) 748382 Kode Pos 75124
Website : <http://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : <admin@disbun.kaltimprov.go.id>
S A M A R I N D A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 188.4/195/Kpts-Disbun/2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memantapkan program pembangunan perkebunan, maka dipandang perlu untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan Tim Penyusun melalui Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa petugas yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk selaku Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. DPA-SKPD Disbun Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 3.27.01.1.01 tanggal 4 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertugas dalam pengumpulan dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : 3.27.01.1.01 tanggal 4 Januari 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 27 Juli 2021

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690120 199403 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala BPKAD Prov. Kaltim di Samarinda

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 188.4/195/Kpts-Disbun/2021
Tanggal : 27 Juli 2021

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021**

No.	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si NIP. 19690120 199403 1 014	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Andi Siddik, SP, M.Ling NIP. 19710518 200003 1 003	Plt. Sekretaris	Penanggung jawab
3.	Nanang Hayani, S.Hut., M.Env.Mgmt NIP. 19761105 199603 1 006	Kasubbag Perencanaan Program	Ketua
4.	Atkhan, SE, M.Si NIP. 19660502 198601 1 001	Kasubbag Keuangan dan Aset	Anggota
5.	Edy Bardianto, SE NIP. 196810171989021001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Muhammad Reza Pahlevi, S.Hut NIP. 19790903 200701 1 007	Pelaksana	Anggota
7.	Santy Marlina, SE NIP. 19731206 200801 2 010	Pelaksana	Anggota
8.	Mega Bharahmawaty NIP. 19800715 200801 2 026	Pelaksana	Anggota
9.	Arni Hartanti, S.Si	Pelaksana	Anggota
10.	Kiki Purwanti, S.Kom	Pelaksana	Anggota
11.	Muhammad Fachrozi, ST	Pelaksana	Anggota

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690120 199403 1 014



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

WEBSITE : <https://disbun.kaltimprov.go.id>

EMAIL : disbun_kaltim@yahoo.com & disbunkaltim@gmail.com